



LKjIP

Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
Tahun 2024



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2024**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Jl. Gatot Subroto No.8 Rembang Telp (0295)6980754
Fax. (0295) 6980754 Web:<http://dinkominfo.rembangkab.go.id>
Email :dinkominfo@rembangkab.go.id
REMBANG - KODE POS 59212**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan. Proses penyusunan laporan ini membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Rembang, 31 Januari 2025

KEPADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG



IB. F. GANTIARTO St
Pembina Utama Muda
NIP. 19651226 199401 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Secara ringkas, penjabaran hasil pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024, masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

- Tujuan : Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
- Indikator : Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
Formulasi Indeks SPBE=
(Indeks Kebijakan+IndeksTata Kelola+Indeks Penerapan Manajemen+IndeksLayanan) /100
Nilai Indeks SPBE dikeluarkan oleh KEMENPANRB
Target Indeks SPBE tahun 2024 sebesar 3,32 dengan realisasi 3,99 dan tingkat pencapaian 120% dengan predikat “sangat baik”
- Sasaran 1 : Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien
- Indikator : a. Indeks Kebijakan
Target indeks kebijakan tahun 2024 sebesar 3,06 dengan realisasi 4,40 dan tingkat pencapaian 144%
- b. Indeks Tata Kelola
Target indeks tata kelola tahun 2024 sebesar 2,66 dengan realisasi 3,70 dan tingkat pencapaian 139%
- c. Indeks Penerapan Manajemen
Target indeks penerapan manajemen tahun 2024 sebesar 2,24 dengan realisasi 2,64 dan tingkat pencapaian 118%
- d. Indeks Layanan
Target indeks layanan tahun 2024 sebesar 3,69 dengan realisasi 4,52 dan tingkat pencapaian 122%
Formulasi = 1/BD X Jumlah (NA X BA)
baca : 1/bobot domain x Jumlah (nilai aspek x bobot aspek)
Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- Sasaran 2 : Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah
- Indikator : e. Indeks KAMI (Keamanan Informasi)
Target indeks KAMI tahun 2024 sebesar 310 dengan realisasi 292 dan tingkat pencapaian 94%
Formulasi Indeks KAMI= Komponen Tata Kelola + Pengelolaan Risiko + Kerangka Kerja Keamanan Informasi + Pengelolaan Aset + Teknologi dan Keamanan Informasi
Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik
 Indikator : f. Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)
 Target skor KIP tahun 2024 sebesar 90 dengan realisasi 92,05 dan tingkat pencapaian 102% dengan kategori “Informatif”
 Formulasi Skor KIP = Website + Penilaian mandiri + Visitasi + Uji Publik
 Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
- Sasaran 4 : Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral
 Indikator : g. Persentase ketersediaan data statistik sektoral
 Target Persentase ketersediaan data statistik sektoral tahun 2024 sebesar 65% dengan realisasi 100% dan tingkat pencapaian 154%
 Formulasi Persentase ketersediaan data statistik sektoral = (Jumlah data statistik yang disajikan/ jumlah data statistik total) x 100%
 Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang mengelola anggaran sebesar Rp6.526.061.980,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.200.043.900,00 atau mencapai 95% dengan sisa anggaran sebesar Rp326.018.080,00. Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang ke depan, sebagai berikut:

1. Menyusun/menyediakan anggaran pembuatan aplikasi permohonan informasi berbasis website;
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, sertifikasi dan pendidikan tentang pelayanan informasi/pengelolaan aduan masyarakat maupun penyelenggaraan workshop dan seminar;
3. Menyusun/menyediakan anggaran sewa/pembuatan aplikasi monitoring opini dan aspirasi publik berupa aplikasi IMA (*Intelligence Media Analytics*) dan ISA (*Intelligence Socio Analytcs*);
4. Penyusunan kelembagaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) melalui penetapan SK Bupati serta pelatihan/workshop pengembangan KIM;
5. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan *smart city*;
6. Pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Rembang;
7. Peningkatan kapasitas SDM pengelola data statistik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
IKHTISAR EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR GAMBAR	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Cascading Kinerja Organisasi	2
1.3 Penjelasan Umum Organisasi	3
1.4 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama	7
1.5 Dukungan Sumberdaya OPD	11
1.6 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	13
1.7 Dasar Hukum	15
1.8 Sistematika Laporan Kinerja	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	17
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	21
2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024	22
2.4 Perjanjian Kinerja 2024	25
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 Capaian Kinerja	35
3.1.1 Skala capaian kinerja	35
3.1.2 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan	36
3.1.3 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan 2 Tahun Terakhir	45
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	45
3.1.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Realisasi Kinerja Provinsi Jawa Tengah	46
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	47
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	50
3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	57
3.2 Realisasi Anggaran	76
3.3 Inovasi	80
3.4 Lintas Sektor	80
BAB IV PENUTUP	84
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Pegawai Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024	12
Tabel 1.2	Daftar Sarana Dan Prasarana Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024	12
Tabel 1.3	Penyajian Struktur Anggaran Tahun 2024	13
Tabel 1.4	Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	13
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026	18
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024	19
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	21
Tabel 2.4	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024	22
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024	26
Tabel 2.6	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024	27
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	36
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024	37
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	45
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	46
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	47
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	48
Tabel 3.7	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	50
Tabel 3.8	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan	54
Tabel 3.9	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	57
Tabel 3.10	Realisasi Capaian Kinerja Program Kegiatan dan Sub. Kegiatan	61
Tabel 3.11	Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub. Kegiatan Tahun 2022 – 2024	67
Tabel 3.12	Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024	76
Tabel 3.13	Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024	76
Tabel 3.14	Kegiatan Kolaboratif Lintas Sektor Yang Dilakukan (Crosscutting) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	2
Gambar 1.2	Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	7
Gambar 2.1	Website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	31
Gambar 2.2	Open Data Rembang	32
Gambar 2.3	Instagram Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	33
Gambar 2.4	Aplikasi <i>Rembang Gemilang Mobile</i>	34
Gambar 2.5	PPID Rembang	34
Gambar 3.1	Nilai SPBE Kabupaten Rembang Tahun 2024	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Cascading Kinerja Organisasi

Selaras dengan paradigma organisasi berbasis kinerja (*performance based organization*) yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

**Gambar 1.1 Cascading Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang**

MISI KE I :

"MENGEMBANGKAN PROFESIONALISASI , MODERNISASI ORGANISASI DAN TATA KERJA BIROKRASI"

TUJUAN BUPATI	INDIKATOR TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH
Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

KEPALA DINAS			
TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Indeks SPBE	1. Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien 2. Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah 3. Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik 4. Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	1. Indeks Kebijakan, Indeks tatakelola, Indeks penerapan manajemen, Indeks layanan 2. Indeks KAMI (Keamanan Informasi) 3. Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik) 4. Persentase ketersediaan data statistik sektoral



SEKRETARIS		KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		KEPALA BIDANG TATA KELOLA DAN LAYANAN INFORMATIKA		KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	
PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum Nilai SAKIP Nilai IKM	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase cakupan pelayanan informasi publik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	a. Persentase OPD yang terkoneksi jaringan b. Layanan SPBE 1. Indeks Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE 2. Indeks Perencanaan Strategis SPBE 3. Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi 4. Indeks Penyelenggaraan SPBE 5. Indeks Penerapan Manajemen SPBE 6. Indeks Pelaksanaan Audit TIK 7. Indeks Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik 8. Indeks Layanan Publik Berbasis Elektronik	a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral b. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	a. Persentase publikasi data statistik sektoral dilingkungan daerah kabupaten / kota b. Persentase cakupan pengamanan Informasi

1.3 Penjelasan Umum Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang. Sedangkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dan berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Sedangkan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang secara lebih rinci adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

a. TUGAS POKOK

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b. FUNGSI :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. SEKRETARIS

a. TUGAS POKOK :

melaksanakan perumusan konsep dan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi program, keuangan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, produk hukum dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

b. FUNGSI :

- 1) Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan dinas;
- 2) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas;
- 3) Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;

- 4) Pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan dinas;
- 5) Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

a. TUGAS POKOK

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang terdiri dari pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

b. FUNGSI ;

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik;
- 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik;
- 3) Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dibagi dalam kelompok fungsi yaitu:

- a. Kelompok Fungsi Pengelolaan Informasi Publik; dan
- b. Kelompok Fungsi Pengelolaan Komunikasi Publik.

4. KEPALA BIDANG TATA KELOLA DAN LAYANAN INFORMATIKA

a. TUGAS POKOK

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang tata kelola dan layanan informatika yang terdiri dari tata kelola informatika dan layanan informatika.

b. FUNGSI

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang tata kelola informatika dan layanan informatika;
- 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang tata kelola informatika dan layanan informatika untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- 3) Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang tata kelola informatika dan layanan informatika; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Tata Kelola dan Layanan Informatika, dibagi dalam kelompok fungsi yaitu:

- a. Kelompok Fungsi Tata Kelola Informatika; dan
- b. Kelompok Fungsi Layanan Informatika.

5. KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN

a. TUGAS POKOK

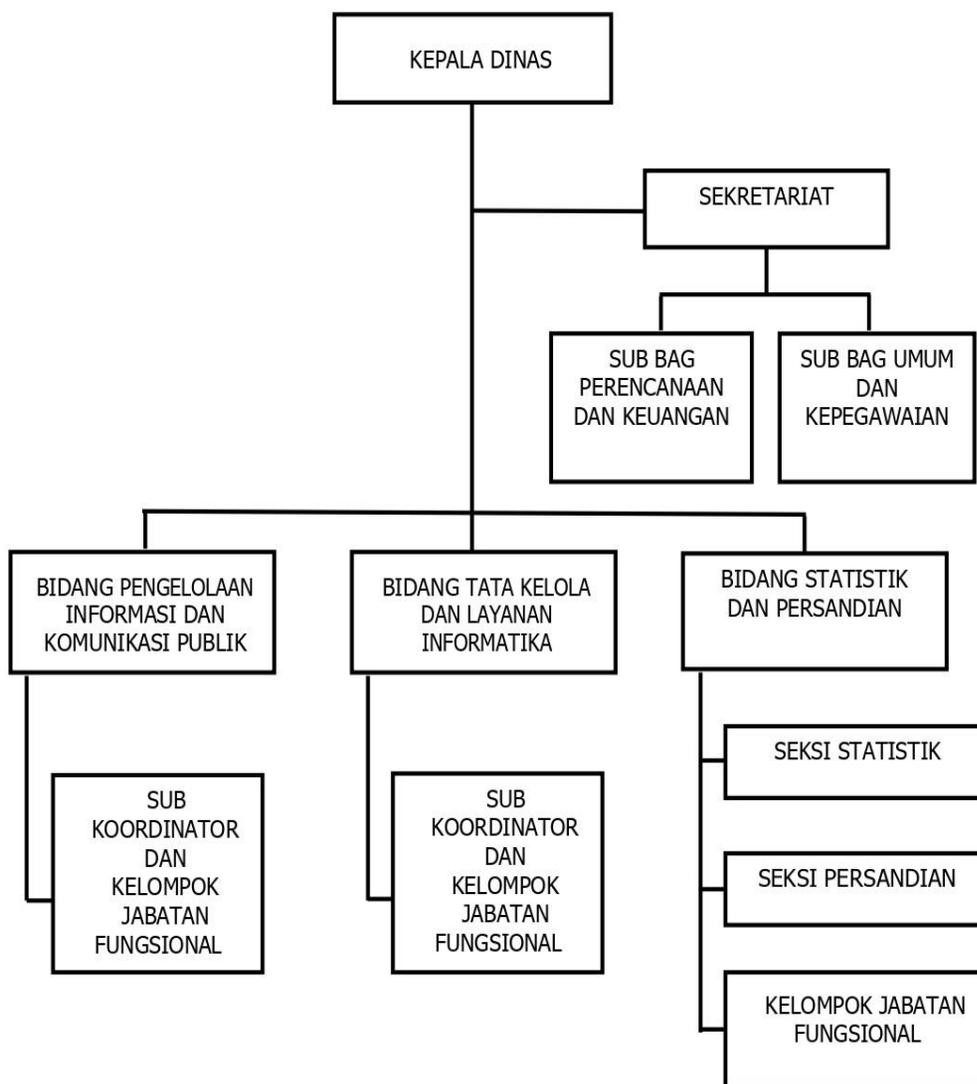
perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang statistik dan persandian yang terdiri dari statistik dan persandian.

b. FUNGSI

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang statistik dan persandian;
- 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang statistik dan persandian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- 3) Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang statistik dan persandian; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang :

Gambar 1.2
Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang



Sumber : Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

1.4 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama

Aspek strategis organisasi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dapat tergambarkan melalui isu strategis yaitu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan.

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang.

Aspek strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

a. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sebagai Pendukung Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan;

SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Evaluasi SPBE oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dalam hal ini kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Dengan pengelolaan SPBE pada tingkat daerah, dapat mendukung transformasi digital terutama di sektor pemerintahan. Transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Implementasi transformasi digital terdapat pada 4 bidang fasilitasi, yaitu: infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.

Adapun layanan SPBE, baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan, yang telah diimplementasikan secara elektronik adalah sebagai berikut :

- 1) Layanan Perencanaan
- 2) Layanan Pengadaan Barang/Jasa
- 3) Layanan Penganggaran
- 4) Layanan Keuangan
- 5) Layanan Kepegawaian

- 6) Layanan Kearsipan
 - 7) Layanan Pengelolaan BMN
 - 8) Layanan Pengawasan Internal
 - 9) Layanan Akuntabilitas Organisasi
 - 10) Layanan Kinerja Pegawai
 - 11) Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
 - 12) Layanan Dasar Data Terbuka
 - 13) Layanan JDIH
 - 14) Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
 - 15) Layanan Dasar Data Terbuka
 - 16) Layanan JDIH
- b. Pengelolaan Data Pemerintah Daerah secara Terpadu dan Terintegrasi

Perkembangan teknologi dan trend pemanfaatan teknologi pada penyediaan layanan publik, menuntut peran pemerintah yang tidak hanya sebagai penyedia layanan namun juga sebagai fasilitator yang berfungsi untuk menjembatani semua *stakeholder* dalam berkontribusi untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Penyelenggaraan Satu Data Rembang perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal. Hal ini diawali dengan pengelolaan Big Data, dimana data yang dibutuhkan sangat besar, bervariasi dan selalu *realtime*. Pemerintah Kabupaten Rembang merencanakan penggunaan Big Data untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat sehingga ke depan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat semakin baik.

- c. Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Suatu Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel.

Pelaksanaan keterbukaan informasi pada badan publik saat ini menjadi suatu kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan. Dengan adanya keterbukaan, diharapkan proses control masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh badan publik dapat dilakukan secara transparan, sehingga dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh badan publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan tujuan *good governance* yakni badan publik dapat menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat, serta menjalankan kegiatan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab untuk memberikan keuntungan yang berarti bagi masyarakat luas. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang selaku PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Utama selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan PPID Pembantu di lingkup Kabupaten Rembang agar senantiasa mempublikasikan informasi yang dimiliki di setiap badan publik kepada masyarakat melalui berbagai media yang dimiliki badan publik. Disamping mempublikasikan informasi kepada masyarakat, badan publik juga dituntut untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi dengan menyiapkan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID).

d. Ketersediaan Data Statistik Sektoral

Ketersediaan data statistik sektoral yang valid mempunyai peran yang penting yaitu sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan maupun kebijakan pemerintah daerah lainnya. Untuk menghasilkan data statistik sektoral yang valid, langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain : koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka mewujudkan Satu Data Rembang, serta peningkatan SDM Wali Data Pendukung.

e. Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik semakin menguatkan bahwa urusan persandian yang berada di bawah pembinaan Badan Siber dan Sandi Negara memiliki tanggung jawab untuk mengamankan penyelenggaraan SPBE. Salah satu program unggulan di dalam RPJMD Kabupaten Rembang adalah "*Digitalisasi Birokrasi dan Rembang Smartcity*" dimana pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting harus didukung dengan sistem keamanan informasi yang baik. Pengamanan informasi harus mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat sehingga mendukung peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka optimalisasi keamanan informasi yang merupakan urusan persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, hal-hal yang perlu dilakukan antara lain :

- 1) Fasilitasi untuk operasionalisasi Tim CISRT (*Computer Security Incident Response Team*) Kabupaten Rembang;
- 2) Peningkatan Kualitas SDM pengelola *cyber security*;
- 3) Pengajuan Layanan *Information Technology Security Assesment* (ITSA).

Adapun permasalahan utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian adalah sebagai berikut :

a. Urusan Komunikasi dan Informatika

- 1) Belum optimalnya pengelolaan urusan komunikasi, terkait penyediaan aplikasi permohonan informasi publik berbasis website dan aplikasi monev serta kapasitas SDM;
- 2) Belum optimalnya penerapan SPBE;
- 3) Belum optimalnya integrasi data antar organisasi perangkat daerah;
- 4) Perlunya peningkatan kapasitas SDM aparatur bidang informatika;
- 5) Keterbatasan anggaran terkait pelaksanaan program *smartcity* yang merupakan program unggulan daerah.

b. Urusan Statistik

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan urusan statistik yang disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, keterbatasan anggaran serta kapasitas SDM statistik;
- 2) Belum tersedianya data geospasial.

c. Urusan Persandian

Belum optimalnya penyelenggaraan urusan persandian yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas SDM yang memiliki kompetensi di bidang keamanan informasi, keterbatasan anggaran serta sarana dan prasarana.

1.5 Dukungan Sumberdaya OPD

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah personel untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024 adalah sebanyak 40 orang dengan rincian sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Daftar Pegawai Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Rembang Tahun 2024

No	Jabatan	Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jumlah	Kualifikasi				Laki-laki	Perempuan
			S2	S1	D3	SMA		
1	2	3	4				5	6
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1		1			1	
B.	Jabatan Administrasi							
	1. Administrator	4	2	2			2	2
	2. Pengawas	4	1	3	0	0	2	2
	3. Pelaksana	14	1	4	1	8	12	2
C.	Jabatan Fungsional	17	0	17	0	0	12	5
	Jumlah	40	4	27	1	8	29	11

b. Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Daftar Sarana Dan Prasarana
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rembang
Tahun 2024

Kode	Klasifikasi	Jumlah Barang (Unit)	Nilai (Rp.)
1.3	Aset Tetap	1,042	8.415.748.416
1.3.2	Peralatan Dan Mesin	1,012	6.733.996.975
1.3.2.02	Alat Angkutan	21	804.064.810
1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	11	6.850.000
1.3.2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	373	1.112.447.825
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	131	1.994.446.247
1.3.2.08	Alat Laboratorium	1	932.400
1.3.2.10	Komputer	475	2.815.255.693
1.3.3	Gedung Dan Bangunan	4	806.582.781
1.3.3.01	Bangunan Gedung	3	736.582.781
1.3.3.03	Bangunan Menara	1	70.000.000
1.3.4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	2	872.268.960
1.3.4.03	Instalasi	1	6.850.000
1.3.4.04	Jaringan	1	865.418.960
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	24	2.899.700
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	24	2.899.700
1.5	Aset Lainnya	30	162.888.058
1.5.4	Aset Lain-Lain	30	162.888.058
1.5.4.01	Aset Lain-Lain	30	162.888.058

c. Anggaran

Pada tahun 2024, anggaran yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Penyajian Struktur Anggaran Tahun 2024

Kode	Uraian	Tahun 2024 (Induk)	Tahun 2024 (Pergeseran 8)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Tahun 2023
1	2	3	4	5 = 4-3	6
4	Pendapatan	175.000.000	175.000.000	0	75.000.000
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	175.000.000	175.000.000	0	75.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	175.000.000	175.000.000	0	75.000.000
5	Belanja Daerah	6.407.546.000	6.526.061.980	118.515.980	6.754.859.145
5.1	Belanja Operasi	6.246.766.000	6.329.061.980	82.295.980	6.540.859.145
5.1.1	Belanja Pegawai	3.285.744.000	3.489.099.980	203.355.980	3.140.306.545
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.961.022.000	2.839.962.000	(121.060.000)	3.330.552.600
5.1.5	Belanja Hibah	0	0	0	70.000.000
5.2	Belanja Modal	160.780.000	197.000.000	36.220.000	214.000.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.780.000	197.000.000	36.220.000	214.000.000

Sumber : DPA SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

1.6 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Tabel 1.4
Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Out Put		Status/ Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung Tindak Lanjut
			SATUAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
	1. Perencanaan Kinerja					
	1) Mengusulkan kepada unit organisasi pengampu perihal penerbitan Pedoman Penyusunan Dokumen Renaksi;	Unit organisasi yang memiliki tupoksi terkait Rencana Aksi, untuk segera menyusun Pedoman Penyusunan Dokumen Renaksi, sehingga OPD bisa mempedomaninya			Proses	
	2) Dokumen Perencanaan Kinerja agar di upload di website resmi;	Dokumen Perencanaan Kinerja akan diupload di website resmi OPD Dinkominfo	dokumen	Renja Dinkominfo Kab. Rembang terupload di website resmi OPD	Tuntas	https://dinkominfo.rembangkab.go.id/informasi-berkala/
	3) Menyelaraskan indikator sasaran pada penjenjangan kinerja (pohon kinerja) sesuai dengan Perubahan IKU yang final;	Indikator sasaran pada pohon kinerja, akan disesuaikan dengan IKU Dinkominfo Kab. Rembang terbaru hasil revisi	dokumen	Pohon Kinerja Dinkominfo Kab. Rembang hasil penyesuaian dengan IKU terbaru	Tuntas	https://bit.ly/Dokumen_SAKIP2024

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Out Put		Status/ Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung Tindak Lanjut
			SATUAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
	2. Pengukuran Kinerja					
	1) Melakukan koordinasi dengan bidang, untuk melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja;	Berkoordinasi dengan bidang di lingkungan internal, untuk melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja.	Laporan	Laporan Capaian Kinerja	Akhir Tahun 2024	
	2) OPD/bagian setda di lingkungan pemerintah daerah yang memiliki tupoksi pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja, agar memanfaatkan aplikasi, ketika melakukan koordinasi pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja dengan OPD;	Memanfaatkan aplikasi dari bagian Administrasi Pembangunan untuk melakukan pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja			Proses	
	3) Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan e-Government untuk meningkatkan kualitas pelayanan;	Menetapkan Kebijakan pengelolaan sistem informasi dan pengelolaan pemerintahan secara elektronik, sehingga mampu memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat	Laporan SOP SK	a. Keputusan Kepala Dinas Kominfo tentang Standar Teknis Pembangunan Dan Pengembangan Aplikasi Khusus Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang b. SOP SPLP c. Surat Edaran SEKDA tentang penggunaan layanan SPLP d. SK Layanan Service Desk e. Indeks SPBE Kabupaten Rembang	Tuntas	https://bit.ly/Dokumen_SAKIP2024
	4) Peningkatan kapasitas SDM di lingkungan internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, terkait pemahaman SAKIP, sehingga masing-masing bidang mampu melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang lebih mendalam secara mandiri.	Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan bidang internal terkait pemahaman SAKIP	Rakor	Koordinasi dan sosialisasi dengan bidang internal terkait pemahaman SAKIP	Tuntas	
	5) Melaksanakan perubahan/ penyesuaian strategi dan kebijakan untuk mencapai kinerja dalam dokumen perubahan renja.	Melakukan penyusunan Renja Perubahan 2024, dengan memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada, efisiensi dalam belanja, pemenuhan kegiatan prioritas yang merupakan belanja mandatory wajib dan mengikat	Dokumen	Renja Perubahan 2024	Tuntas	https://bit.ly/Dokumen_SAKIP2024
	6) Dokumentasi rapat penyusunan laporan kinerja dan monev pengukuran kinerja triwulanan dengan Daftar Hadir & Notulen	Mendokumentasikan laporan kinerja monev pengukuran kinerja	Dokumentasi	Bukti dokumentasi penyusunan laporan kinerja dan monev	Tuntas	https://bit.ly/Dokumen_SAKIP2024
	3. Pelaporan Kinerja					
	1) Dokumen Laporan Kinerja belum dipublikasikan.	Dokumen Laporan Kinerja akan dipublikasikan dalam website OPD	laporan	LKjIP Dinkominfo Kab. Rembang Tahun 2023	Tuntas	https://dinkominfo.kab.go.id/informasi-berkala/

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Out Put		Status/ Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung Tindak Lanjut
			SATUAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
	2) Melampirkan bukti foto atau scan pengiriman LKJ OPD kepada KDH.	Bukti foto atau scan pengiriman LKjIP ke Bag. Organisasi dakan dilampirkan	Bukti Pengiriman LKjIP	Bukti foto pengiriman LKjIP	Tuntas	https://bit.ly/Dokumen_SA_KIP2024
	3) Penyusunan Laporan Kinerja agar dibuktikan dengan dokumentasi daftar hadir, foto dan notulen rapat.	Terkait kelengkapan penyusunan dokumen kinerja, yang meliputi dokumentasi, daftar hadir dan notulen rapat akan dilampirkan	Dokumentasi	Dokumentasi penyusunan Laporan Kinerja	Tuntas	https://bit.ly/Dokumen_SA_KIP2024
	4) Informasi dalam laporan kinerja berkala agar digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.	Informasi dalam laporan kinerja akan digunakan sebagai bahan masukan/ pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan agar kinerja lebih maksimal			Tuntas	
	5) Informasi dalam laporan kinerja agar digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	Untuk tahun depan, informasi dalam laporan kinerja akan digunakan sebagai bahan masukan/ pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan			Tuntas	
	4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal					
	Mendokumentasikan berupa Daftar Hadir dan Notulensi Atas Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi Implementasi AKIP Internal.	Melengkapi dokumentasi penyusunan Laporan Kinerja	Dokumentasi	Dokumentasi penyusunan Laporan Kinerja	Tuntas	https://bit.ly/Dokumen_SA_KIP2024

1.7 Dasar Hukum

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang disusun berdasarkan peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.8 Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024 adalah:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan perangkat daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Dokumen rencana strategis ini mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan pada masa lima tahun ke depan. Rencana strategis disusun sebagai pedoman dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan demi tercapainya akuntabilitas kinerja.

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana yang termaktub dalam Renstra Dinkominfo Tahun 2021-2026 adalah **“Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah”**. Hal ini sejalan dengan visi Bupati Rembang sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Rembang Gemilang 2026”**. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam 4 (empat) misi, dimana tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah menunjang misi ke-1(satu) yaitu **“Mengembangkan profesionalitas, modernisasi organisasi, dan tata kerja birokrasi”**. Salah satu tujuan dari misi ke 1(satu) adalah **“Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih”** dengan sasaran **“Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan”**. Salah satu indikator sasaran tersebut adalah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan indikator tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dari tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut dijabarkan kedalam 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien;
- 2) Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah;
- 3) Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik;
- 4) Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral.

Berikut adalah tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026 :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		Indikator Tujuan :	2,76	3,2	3,23	3,32	3,35	3,40	
			Indeks SPBE							
				Indikator Sasaran						
			a. Terwujudnya Manajemen Dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien	Indeks Kebijakan	2,8	3,00	3,03	3,06	3,09	3,12
				Indeks Tata Kelola	2,2	2,6	2,63	2,66	2,69	2,72
				Indeks Penerapan Manajemen	1,00	2,18	2,21	2,24	2,27	2,30
				Indeks Layanan	3,69	3,63	3,66	3,69	3,72	3,75
			b. Terwujudnya Perlindungan Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	289	290	300	310	320	330
			c. Meningkatkan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	59,85	90	90	90	90	90
			d. Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	50	55	60	65	70	75

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indeks SPBE	angka	Merupakan suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di sebuah Instansi baik di Pusat maupun di Pemerintah Daerah	Hasil penilaian dan evaluasi dari Kementerian PANRB Indeks SPBE= (Indeks Kebijakan+IndeksTata Kelola+Indeks Penerapan Manajemen+IndeksLayanan) /100	KEMENTERIAN PAN RB
a.	Terwujudnya Manajemen Dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien	1) Indeks Kebijakan	angka	Merupakan kebijakan internal/ pengaturan pengaturan di dalam kebijakan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	Hasil penilaian dan evaluasi dari Kementerian PANRB 1/BD X Jumlah (NA X BA) baca : 1/bobot domain x Jumlah (nilai aspek x bobot aspek)	KEMENTERIAN PAN RB
		2) Indeks Tata Kelola	angka	Merupakan proses/ implementasi dari kebijakan yang telah dilaksanakan oleh IPPD perencanaan penerapan analisis evaluasi tindak lanjut	Hasil penilaian dan evaluasi dari Kementerian PANRB 1/BD X Jumlah (NA X BA) baca : 1/bobot domain x Jumlah (nilai aspek x bobot aspek)	KEMENTERIAN PAN RB
		3) Indeks Penerapan Manajemen	angka	Merupakan proses/ implementasi dari penerapan manajemen yang telah dilaksanakan oleh IPPD (perencanaan penerapan pelaksanaan analisis evaluasi tindak lanjut)	Hasil penilaian dan evaluasi dari Kementerian PANRB 1/BD X Jumlah (NA X BA) baca : 1/bobot domain x Jumlah (nilai aspek x bobot aspek)	KEMENTERIAN PAN RB
		4) Indeks Layanan	angka	Merupakan penerapan penggunaan terhadap layanan aplikasi sejenis , baik yang dikembangkan oleh IPPD atau menggunakan Aplikasi Umum / Instansi lain	Hasil penilaian dan evaluasi dari Kementerian PANRB 1/BD X Jumlah (NA X BA) baca : 1/bobot domain x Jumlah (nilai aspek x bobot aspek)	KEMENTERIAN PAN RB

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
b.	Terwujudnya Perlindungan Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	1) Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	angka	Nilai indeks untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah	Indeks KAMI (Kematangan Keamanan Informasi) Formulasi = Komponen Tata Kelola + Pengelolaan Risiko + Kerangka Kerja Keamanan Informasi + Pengelolaan Aset + Teknologi dan Keamanan Informasi	Hasil Laporan Penilaian Mandiri Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Kabupaten Rembang dilakukan secara mandiri
c.	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	1) Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	angka	Nilai/ indeks untuk mengukur kepatuhan badan publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui layanan informasi publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Formulasi = Website + Penilaian mandiri + Visitasi + Uji Publik	Nilai KIP dikeluarkan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah
d.	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	1) Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	%	Persentase atau bagian dari seluruh data pembangunan yang bersifat numerik yang disediakan/dipublikasikan untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Formulasi = (Jumlah data statistik yang disajikan/ jumlah data statistik total) x 100%	OPD se-Kabupaten Rembang

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah pada Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
I	Tujuan :		
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		
II	Sasaran :		
a.	Terwujudnya Manajemen Dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien	Peningkatan kebijakan internal, layanan dan optimalisasi strategi dan perencanaan	Peningkatan Kebijakan Internal Tata Kelola, Perencanaan Strategis, Penyelenggaraan Penerapan Manajemen Pelaksanaan Audit TIK, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, layanan publik berbasis elektronik.
b.	Terwujudnya Perlindungan Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	Peningkatan tata kelola keamanan informasi	Peningkatan perencanaan tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja, pengelolaan aset informasi, serta teknologi dan keamanan informasi
c.	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Peningkatan sistem pelayanan informasi publik dan penguatan pengelolaan informasi dan dokumentasi	Peningkatan pemantauan opini dan aspirasi masyarakat melalui media massa Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Media Peningkatan Produksi Konten Informasi Publik Peningkatan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat
d.	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Peningkatan kualitas pengelolaan data statistik sektoral	Penerapan Sistem Statistik Nasional dalam pengelolaan statistik sektoral dan Satu Data Indonesia

2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. rencana kinerja tahun 2024 termuat di dalam dokumen renja perangkat daerah tahun 2024. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Adapun struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024 tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Terkait
Langsung Pencapaian Sasaran Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Induk 2024	Pergeseran 8 2024	Bertambah (Berkurang)
1	2	3	4	5	6
		Belanja Dinas Komunikasi Dan Informatika	6.407.546.000	6.526.061.980	118.515.980
		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	6.407.546.000	6.526.061.980	118.515.980
		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	6.257.546.000	6.362.561.980	105.015.980
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.232.546.000	5.238.561.980	6.015.980
		Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.030.000	41.030.000	31.000.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000	3.500.000	0
		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.430.000	1.430.000	0
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.300.000	3.300.000	0

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Induk 2024	Pergeseran 8 2024	Bertambah (Berkurang)
1	2	3	4	5	6
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.800.000	32.800.000	31.000.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.286.744.000	3.490.099.980	203.355.980
		Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	3.259.444.000	3.338.499.980	79.055.980
		Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26.300.000	150.600.000	124.300.000
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	1.000.000	0
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	132.750.000	157.250.000	24.500.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.570.000	10.570.000	0
		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	21.180.000	45.680.000	24.500.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	10.000.000	0
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	20.000.000	0
		Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	8.000.000	8.000.000	0
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan	6.000.000	6.000.000	0
		Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	15.000.000	0
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	42.000.000	42.000.000	0
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.728.827.000	1.474.997.000	-253.830.000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.675.000	1.675.000	0
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1.066.000.000	925.200.000	(140.800.000)
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	661.152.000	548.122.000	(113.030.000)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.195.000	75.185.000	990.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.010.000	36.000.000	990.000

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Induk 2024	Pergeseran 8 2024	Bertambah (Berkurang)
1	2	3	4	5	6
		Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	15.000.000	15.000.000	0
		Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.185.000	10.185.000	0
		Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	14.000.000	14.000.000	0
1.	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	725.000.000	754.000.000	29.000.000
		Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	725.000.000	754.000.000	29.000.000
		Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	15.000.000	24.000.000	9.000.000
		Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	127.000.000	127.000.000	0
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	108.000.000	108.000.000	0
		Pelayanan Informasi Publik	20.000.000	40.000.000	20.000.000
		Layanan Hubungan Media	430.000.000	430.000.000	0
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas	25.000.000	25.000.000	0
2.	Terwujudnya Manajemen Dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	300.000.000	370.000.000	70.000.000
		Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	30.000.000	0
		Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	30.000.000	30.000.000	0
		Pengelolaan E- Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	270.000.000	340.000.000	70.000.000
		Sinkronisasi Rencana Induk Dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	30.000.000	111.440.000	81.440.000
		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	220.000.000	208.560.000	(11.440.000)

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Induk 2024	Pergeseran 8 2024	Bertambah (Berkurang)
1	2	3	4	5	6
		Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas Dan Kota Cerdas	20.000.000	20.000.000	0
		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	125.000.000	130.000.000	5.000.000
3.	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	125.000.000	130.000.000	5.000.000
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000	130.000.000	5.000.000
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	25.000.000	30.000.000	5.000.000
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	100.000.000	100.000.000	0
		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	25.000.000	33.500.000	8.500.000
4.	Terwujudnya Perlindungan Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	25.000.000	33.500.000	8.500.000
		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	33.500.000	8.500.000
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik	25.000.000	33.500.000	8.500.000

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun Perjanjian Kinerja (PK). Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perjanjian Kinerja merupakan tolok ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode satu tahun serta merupakan syarat dalam penyusunan SAKIP yang akan digunakan oleh para pejabat dalam mengelola dan meningkatkan kinerja organisasi.

Dalam Perjanjian Kinerja terdapat pernyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab. Adapun Perjanjian kinerja oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tujuan : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indikator Tujuan : Indeks SPBE	3,32
2	Sasaran :	Indikator Sasaran	
a.	Terwujudnya Manajemen Dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien	Indeks Kebijakan	3,06
		Indeks Tata Kelola	2,66
		Indeks Penerapan Manajemen	2,24
		Indeks Layanan	3,69
b.	Terwujudnya Perlindungan Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	310
c.	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	90
d.	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	65

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	370.000.000	APBD
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	754.000.000	APBD
3	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	33.500.000	APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	130.000.000	APBD
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	5.238.561.980	APBD
Jumlah		6.526.061.980	

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut, berkontribusi pada pencapaian misi daerah yang ke 1(satu) yaitu **“Mengembangkan profesionalitas, modernisasi organisasi, dan tata kerja birokrasi”** dengan sasaran daerah **“Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan”** dimana salah satu indikator sasaran daerah tersebut adalah Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, dengan mengacu pada DPA tahun anggaran 2024, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang melaksanakan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub. Kegiatan.

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang:

Tabel 2.6
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
I	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika		
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	73
		Nilai IKM	83
		Persentase ketercapaian pelayanan umum	100%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan	100%
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen
b	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen
c	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan

No.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
d	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	2 dokumen
a	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang
b	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
c	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
b	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
e	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
f	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen
g	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket
h	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang kantor dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan	100%
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peralatan dan Mesin Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit

No.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
b	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 unit
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 unit
B	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase cakupan pelayanan informasi publik	100%
1	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi publik yang disajikan badan publik kabupaten dan OPD	100%
a	Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2 dokumen
b	Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 dokumen
c	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 dokumen
d	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 dokumen
e	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 layanan
f	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 dokumen
C	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan	100%
1	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan OPD dan desa yang menggunakan domain dan sub domain rembangkab.go.id	335 domain
a	Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen

No.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
2	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tata kelola SPBE	4 layanan : 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah
a	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 dokumen
b	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 dokumen
c	Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas Dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 dokumen
II	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		
A	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase publikasi data statistik sektoral	100%
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyusun data statistik/berkontribusi dalam sistem satu data	40 OPD
a	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	15 dokumen
b	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	40 OPD
III	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian		
A	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase cakupan pengamanan informasi	100%
1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya	100%
a	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, beberapa tool yang digunakan antara lain :

a. Website Perangkat Daerah

Website perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah memiliki fungsi

- 1) sumber informasi resmi dan akurat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan daerah, seperti kebijakan pemerintah, program pembangunan, pengumuman penting, dan layanan publik;
- 2) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah daerah melalui website, seperti anggaran, program, dan realisasi Pembangunan;
- 3) menjadi platform untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat dapat memberikan masukan, saran, dan kritik melalui website, yang kemudian akan dipertimbangkan oleh pemerintah daerah;

Gambar 2.1
Website Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang

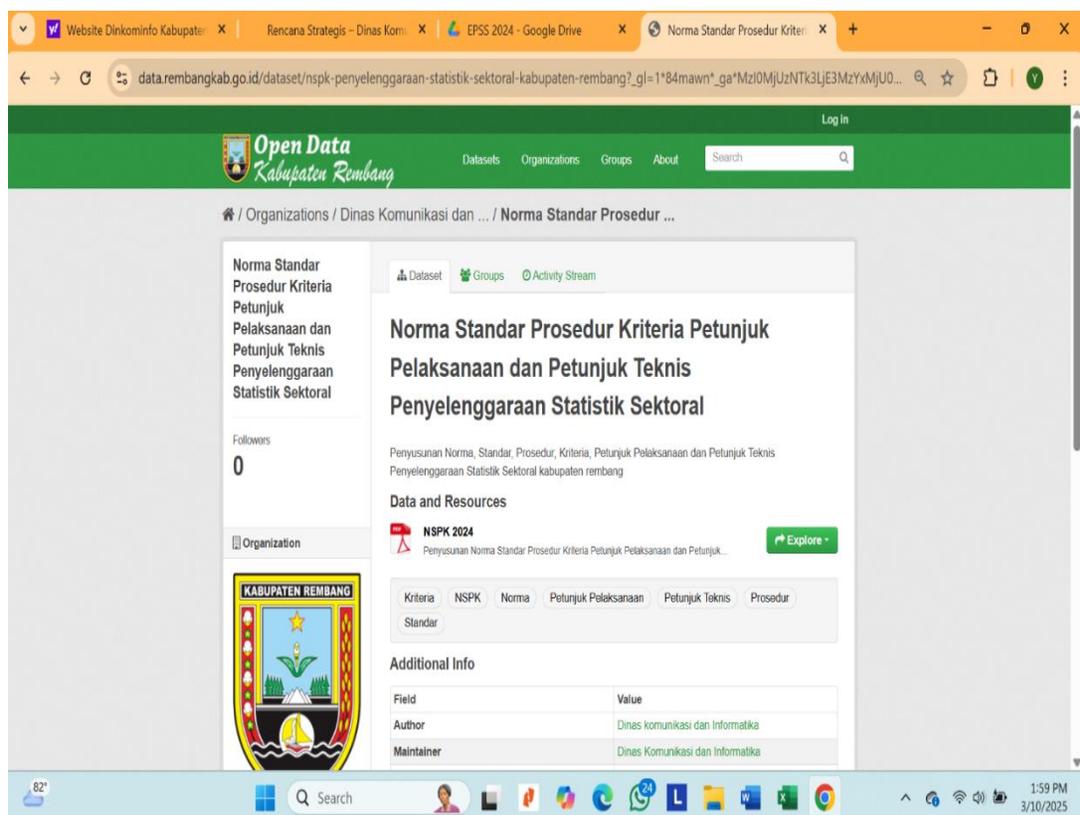


b. Open Data Rembang

Open data berisikan data-data statistik sektoral di lingkungan pemerintah Kabupaten Rembang yang memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak. diantaranya :

- 1) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas: open data statistik memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan menganalisis data publik, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai sektor, seperti pemerintahan, ekonomi, dan sosial;
- 2) Pengembangan riset dan inovasi: data statistik yang terbuka dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, dan inovator untuk mengembangkan penelitian, model, dan solusi baru dalam berbagai bidang;
- 3) Pengambilan keputusan yang lebih baik: data statistik yang akurat dan mudah diakses membantu pengambil keputusan, baik di sektor publik maupun swasta, untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif;
- 4) Peningkatan partisipasi publik: open data statistik memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan, sehingga meningkatkan partisipasi publik dalam berbagai isu.

Gambar 2.2 Open Data Rembang

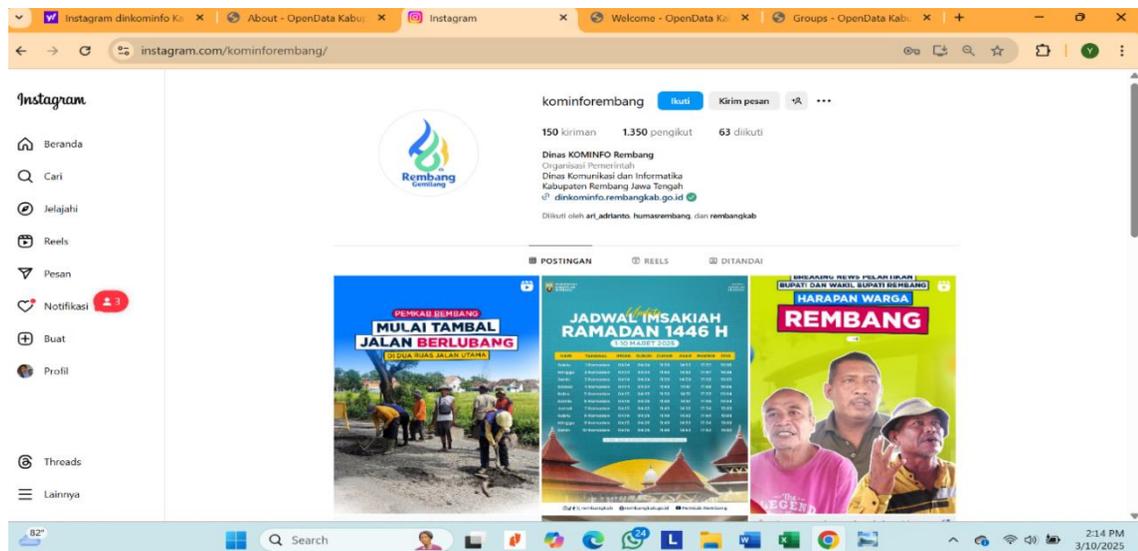


c. Instagram

Untuk keperluan peningkatan pelayanan keterbukaan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang juga memanfaatkan *platform* Instagram pada akun `@kominforembang`.

Media sosial ini merupakan ajang komunikasi publik dan pelayanan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan dinkominfo serta informasi-informasi umum lainnya.

Gambar 2.3 Instagram Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang



d. Aplikasi *Rembang Gemilang Mobile*

Dalam upaya mewujudkan visi Rembang sebagai *Smart City* pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Rembang memperkenalkan aplikasi *Rembang Gemilang Mobile*. Aplikasi ini merupakan bagian dari inisiatif Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik melalui teknologi digital. Aplikasi ini menyediakan informasi terkini terkait berbagai aspek kehidupan di Kabupaten Rembang, termasuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Melalui *Rembang Gemilang Mobile*, pemerintah kabupaten menghadirkan berbagai layanan cerdas yang mendukung visi Rembang Gemilang 2026. Aplikasi ini menyediakan berbagai macam fitur yang dapat diakses oleh masyarakat. Aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya integrasi dan digitalisasi layanan publik di Kabupaten Rembang. Dengan adanya aplikasi ini, Pemerintah Kabupaten Rembang terus menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan *Smart City* yang berorientasi pada pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk mendapatkan layanan yang lebih baik dan informasi yang akurat, dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

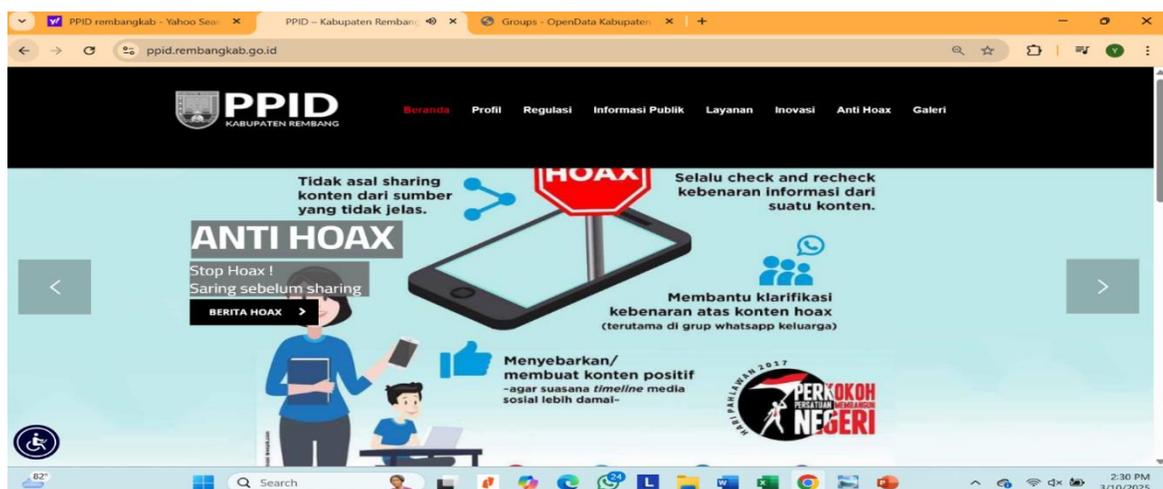
Gambar 2.4 Aplikasi Rembang Gemilang Mobile



e. PPID

Salah satu elemen penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting, karena masyarakat publik memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Rembang terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud kepatuhan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Implementasi UU KIP tersebut adalah diterbitkanlah Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rembang, yang bertujuan untuk mewujudkan *open government* (pemerintahan yang terbuka) di Kabupaten Rembang.

Gambar 2.5 PPID Rembang



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang tahun 2024 diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yang ditandatangani. Capaian kinerja tersebut menggambarkan hasil dari kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam menunjang urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/ Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

3.1.2 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang selama tahun 2024 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pelaksanaan kinerja anggaran, dan kinerja lainnya yang menunjukkan *achievement* dan penghargaan yang diperoleh selama tahun 2024 yang memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Selain itu pelaksanaan evaluasi internal yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam upaya meningkatkan pengelolaan kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada pengukuran yang tercantum dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang. Penilaian dimaksud tidak lepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran atau tujuan. Agar mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

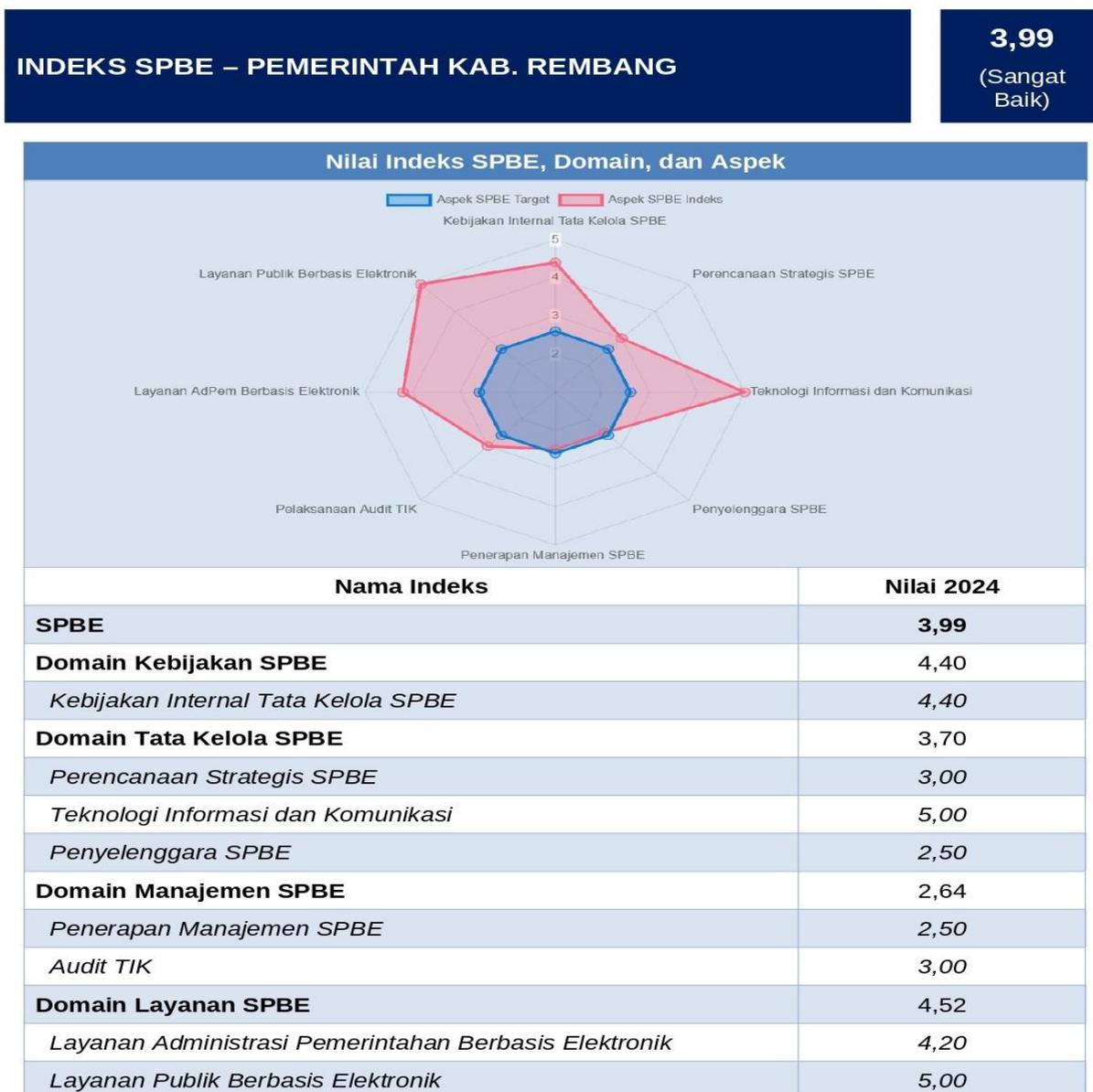
No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indikator Tujuan : Indeks SPBE	3,32	3,99	120%	Sangat Tinggi	KEMENTERIAN PAN RB
		Indikator Sasaran					
a.	Terwujudnya Manajemen Dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien	Indeks Kebijakan	3,06	4,40	144%	Sangat Tinggi	KEMENTERIAN PAN RB
		Indeks Tata Kelola	2,66	3,70	139%	Sangat Tinggi	KEMENTERIAN PAN RB
		Indeks Penerapan Manajemen	2,24	2,64	118%	Sangat Tinggi	KEMENTERIAN PAN RB
		Indeks Layanan	3,69	4,52	122%	Sangat Tinggi	KEMENTERIAN PAN RB
b.	Terwujudnya Perlindungan Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	310	292	94%	Sangat Tinggi	Hasil Laporan Penilaian Mandiri Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Kabupaten Rembang dilakukan secara mandiri
c.	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	90	92,05	102%	Sangat Tinggi	Nilai KIP dikeluarkan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah
d.	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	65	100	154%	Sangat Tinggi	OPD se-Kabupaten Rembang

Capaian kinerja Dinas Komunikas dan Informatika dengan 4 (empat) sasaran sebagaimana disajikan dalam tabel 3.2, secara umum memenuhi target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan capaian ke empat sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Manajemen dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan Nilai yang mempresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang meliputi tingkat kematangan kebijakan, tata kelola, penerapan manajemen dan layanan. SPBE berguna untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Pada indikator indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nilainya untuk tahun 2024 sebesar 3,99 dengan predikat “sangat baik” meningkat dibandingkan tahun 2023. Adapun penjelasan nilai SPBE Kabupaten Rembang secara rinci adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1
Nilai SPBE Kabupaten Rembang Tahun 2024



1) Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah kabupaten Rembang adalah dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi SPBE.

2) Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah kabupaten Rembang adalah dengan adanya Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Inovasi Proses Bisnis SPBE.

3) Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah kabupaten Rembang adalah dengan adanya Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan.

4) Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah kabupaten Rembang adalah dengan adanya Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE dan Kolaborasi Penerapan SPBE.

5) Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah kabupaten Rembang adalah dengan adanya Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE.

6) Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah kabupaten Rembang adalah dengan adanya Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE.

7) Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi, Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah kabupaten Rembang adalah dengan adanya Layanan Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Kepegawaian, Kearsipan Dinamis, Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Pengawasan Internal Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Kinerja Pegawai.

8) Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah kabupaten Rembang adalah dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Data Terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1-3.

b. Terwujudnya Perlindungan Terhadap Informasi Pemerintah Daerah

Indeks KAMI (Keamanan Informasi) merupakan Nilai indeks yang berguna untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah. Nilai ini berguna untuk mengetahui kondisi keamanan informasi saat ini dimana Indeks KAMI merupakan tools, untuk menentukan kondisi tingkat keamanan informasi yang merujuk pada SNI ISO/IEC 27001:2009 serta untuk memperbaiki, membangun, dan menjalankan keamanan informasi.

Dalam hal keamanan informasi, melalui Forum Persandian dan Kemanan Informasi berupaya untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Selain itu juga dilakukan audit keamanan infromasi bagi perangkat daerah untuk memastikan implementasi kebijakan keamanan informasi. Tidak semua perangkat daerah memiliki SPBE khusus yang diimplementasikan pada perangkat daerah tersebut, maka untuk mengukur tingkat keamanan informasi dimulai dari pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi. Pada laporan tingkat keamanan informasi tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Rembang menggunakan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) versi 4.2 Tahun 2021 yang dibuat oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang merujuk pada ISO 27001:2013 dengan skor 292. Penilaian menggunakan Indeks KAMI dilakukan pada 7 (tujuh) area yaitu :

- 1) Kategori Sistem Elektronik (SE)
- 2) Tata Kelola Keamanan Informasi
- 3) Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi
- 4) Kerangka Kerja Keamanan Informasi
- 5) Pengelolaan Aset Keamanan Informasi
- 6) Teknologi dan Keamanan Informasi
- 7) Suplemen

Dalam hal regulasi, untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dimana setiap instansi pusat dan pemerintah daerah harus menerapkan keamanan SPBE, maka pada tahun 2024 ditetapkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

c. Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik

Pada indikator Keterbukaan Informasi Publik (KIP) , nilai skor untuk tahun 2024 sebesar 92,05 dengan kategori “informatif”, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 94,56. Hal ini dikarenakan capaian nilai pada publikasi website dan medsos PPID kurang maksimal. Penilaian ini dilakukan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dengan mempertimbangkan hal-hal, antara lain: monitoring dan evaluasi badan publik yang meliputi konten informasi publik wajib berkala, penilaian website dan media sosial, penilaian *Self Assessment Quisioner* (SAQ) melalui aplikasi *E-monev*, hasil visitasi dan verifikasi serta hasil uji publik.

d. Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektor

Data sektoral merupakan data statistik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pembangunan dan pemerintahan. Pembinaan statistik sektoral dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) agar dapat menghasilkan data yang berkualitas dan mudah diseminasikan. BPS juga melakukan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral untuk mengukur tingkat kematangannya. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Rembang resmi menerbitkan Buku Statistik Sektoral Kabupaten Rembang. Buku ini memuat hasil kompilasi data statistik sektoral dari berbagai perangkat daerah yang bertindak sebagai produsen data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran data secara umum terkait penyelenggaraan bidang pemerintahan, produk hukum, keuangan daerah, kepegawaian daerah dan sebagainya. Penerbitan Buku Statistik Sektoral Kabupaten Rembang merupakan bentuk perwujudan akuntabilitas hasil kegiatan pelaksanaan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dan berguna sebagai bahan evaluasi, monitoring dan perencanaan kegiatan pembangunan. Kedepan terkait dengan data-data akan dikaji lebih detail, sehingga bisa memberikan kontribusi terkait pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Rembang yang lebih gemilang.

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, masih ditemui permasalahan dan kekurangan yang berkaitan dengan pencapaian kinerja diantaranya sebagai berikut :

- 1) Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a Belum tersedianya aplikasi permohonan informasi publik berbasis website dalam rangka pengembangan inovasi keterbukaan informasi;
 - b Kurangnya SDM yang kompeten dalam menangani/memahami mekanisme pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR pada seluruh OPD;
 - c Belum tersedianya aplikasi monitoring opini dan aspirasi publik melalui media massa untuk mengetahui isu-isu terkini secara tepat dan *realtime* sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan daerah;
 - d Belum dilakukannya pembentukan kelembagaan kembali (re-organisasi) dan pengembangan Komunitas Informasi Masyarakat sebagai mitra komunikasi kebijakan/program/kegiatan pemerintah;
 - e Keterbatasan Anggaran dan belum adanya petunjuk teknis evaluasi performa media yang komprehensif;
 - f Keterbatasan anggaran terkait sarana prasarana/peralatan radio dalam pengelolaan LPPL CB FM;
 - g Kurangnya SDM dalam mengelola urusan informatika;
 - h Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan program smart city;
 - i Infrastruktur teknologi yang tidak memadai;
 - j Rendahnya kesadaran tentang keamanan siber.

2) Urusan Statistik

- a Belum adanya sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Rembang;
- b Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan koordinasi dengan BPS dan OPD;
- c Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi pengelolaan statistik di tiap OPD;
- d Belum tersedianya data geospasial dikarenakan belum adanya SDM, sarana dan prasarana geospasial.

3) Urusan Persandian

- a Belum adanya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang keamanan informasi;
- b Keterbatasan anggaran untuk kegiatan pelatihan terkait bidang keamanan informasi ;
- c Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.

Sedangkan langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut antara lain :

1) Urusan Komunikasi dan Informatika

- a Menyusun/menyediakan anggaran pembuatan aplikasi permohonan informasi berbasis website;
- b Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, sertifikasi dan pendidikan tentang pelayanan informasi/pengelolaan aduan masyarakat maupun penyelenggaraan workshop dan seminar;
- c Menyusun/menyediakan anggaran sewa/pembuatan aplikasi monitoring opini dan aspirasi publik berupa aplikasi IMA (*Intelligence Media Analytics*) dan ISA (*Intelligence Socio Analytics*);
- d Penyusunan kelembagaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) melalui penetapan peraturan/surat keputusan bupati serta pelatihan/ workshop pengembangan KIM;
- e Menambah anggaran dan melakukan evaluasi/penghitungan performa media komunikasi publik milik pemerintah kabupaten agar dapat mengevaluasi sebaran konten, *insight*, *engagement rate* untuk mengetahui tingkat keterlibatan masyarakat pada berbagai kebijakan/program/kegiatan pemerintah;

- f Menambah anggaran pengadaan/peremajaan peralatan studio radio serta pemindahan menara;
- g Peningkatan SDM untuk menambah pengetahuan urusan bidang informatika;
- h Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan *smart city*;
- i Peningkatan dan pengadaan infrastruktur, mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan perangkat baru atau peningkatan perangkat yang ada sesuai dengan hasil inventarisasi;
- j Penggunaan Sistem Keamanan yang handal mengadopsi teknologi keamanan siber, seperti firewall, antivirus, dan sistem deteksi ancaman (*intrusion detection systems*).

2) Urusan Statistik

- a Pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Rembang;
- b Menyiapkan anggaran yang cukup untuk melaksanakan koordinasi dengan BPS dan OPD terkait dalam penyelenggaraan statistik sektoral;
- c Peningkatan kapasitas kompetensi SDM pengelola data statistik;
- d Penguasaan SDM, sarana dan prasarana untuk pengelolaan Geospasial.

3) Urusan Persandian

- a Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, sertifikasi, pendidikan di bidang persandian dan keamanan informasi, dan menyelenggarakan workshop dan seminar tentang persandian dan teknologi terbaru yang terkait serta pengadaan SDM Manggala Informatika;
- b Menyusun anggaran untuk pendidikan dan pelatihan secara berkala, serta program pengembangan karir untuk profesional persandian.

3.1.3 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan 2 Tahun Terakhir

Perbandingan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Tujuan : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indikator Tujuan : Indeks SPBE	2,76	3,19	3,64	3,32	3,99	120%
	Sasaran :	Indikator Sasaran :						
I.1	Terwujudnya Manajemen Dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien	Indeks Kebijakan	2,80	3,40	4,50	3,06	4,40	144%
		Indeks Tata Kelola	2,20	2,70	3,10	2,66	3,70	139%
		Indeks Penerapan Manajemen	1,00	2,55	2,36	2,24	2,64	118%
		Indeks Layanan	3,69	3,63	4,14	3,69	4,52	122%
I.2	Terwujudnya Perlindungan Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	289	294	290	310	292	94%
I.3	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	59,85	85,98	95,46	90	92,05	102%
I.4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	NA	55	100	65	100	154%

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6 = 4/5 \times 100$
I	Tujuan : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indikator Tujuan : Indeks SPBE	3,99	3,40	117%
	Sasaran :	Indikator Sasaran :			
I.1	Terwujudnya Manajemen Dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien	Indeks Kebijakan	4,40	3,12	141%
		Indeks Tata Kelola	3,70	2,72	136%
		Indeks Penerapan Manajemen	2,64	2,30	115%
		Indeks Layanan	4,52	3,75	121%
I.2	Terwujudnya Perlindungan Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	292	330	88%
I.3	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	92,05	90	102%
I.4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100	75	133%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 7 (tujuh) indikator sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang yang sudah ditetapkan, secara umum memenuhi target akhir sebagaimana yang ditetapkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan rencana strategis tersebut.

3.1.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Realisasi Kinerja Provinsi Jawa Tengah

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Provinsi Jawa Tengah diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dengan
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Kabupaten Tahun 2024	Realisasi Kinerja Provinsi Tahun 2024	% Capaian
1	2	3	4	5	$6 = 4/5 * 100$
I	Tujuan : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indikator Tujuan : Indeks SPBE	3,99	4,42	90%
	Sasaran :	Indikator Sasaran :			
I.1	Terwujudnya Manajemen Dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien	Indeks Kebijakan	4,40		
		Indeks Tata Kelola	3,70		
		Indeks Penerapan Manajemen	2,64		
		Indeks Layanan	4,52		
I.2	Terwujudnya Perlindungan Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	292		
I.3	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	92,05	97,68	94%
I.4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100		

3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan
pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Tujuan : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indikator Tujuan : Indeks SPBE	3,32	3,99	120%	Hasil evaluasi SPBE tahun 2024 meningkat 0,35 dari tahun sebelumnya. Hal ini terkait penguatan dari sisi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan TIK.	
	Sasaran :	Indikator Sasaran :					
I.1	Terwujudnya Manajemen Dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien	Indeks Kebijakan	3,06	4,40	144%	Indeks Kebijakan Internal SPBE mengalami peningkatan, hal ini karena telah dilakukan reviu kebijakan internal SPBE dan menyusun turunan kebijakan dan SOP	Perlu dilakukan reviu menyeluruh terhadap kebijakan internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Rembang agar selaras dengan kebijakan SPBE yang baru dari pemerintah pusat.
		Indeks Tata Kelola	2,66	3,70	139%	Indeks tata kelola SPBE mengalami peningkatan, hal ini karena telah ditetapkan SK Bupati terkait Arsitektur dan Peta Rencana SPBE serta kelengkapan dokumen tata kelola SPBE	Meninjau kembali kelengkapan dokumen tata kelola SPBE untuk memastikan bahwa semua aspek telah memenuhi standar dan regulasi terbaru dari pemerintah pusat

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Indeks Penerapan Manajemen	2,24	2,64	118%	Indeks manajemen SPBE mengalami peningkatan, hal ini karena manajemen SPBE telah ditetapkan pada Peta Rencana SPBE	Memastikan bahwa seluruh elemen dalam Peta Rencana SPBE yang terkait dengan manajemen SPBE dilaksanakan dan di dokumentasikan secara terstruktur.
		Indeks Layanan	3,69	4,52	122%	Indeks layanan SPBE mengalami peningkatan, hal ini karena telah dilakukan reviu pada layanan aplikasi adm pemerintah dan publik serta telah dilakukan integrasi antar sistem	Peningkatan Kualitas Reviu Layanan Aplikasi dan Optimalisasi Integrasi Antar Sistem
I.2	Terwujudnya Perlindungan Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	310	292	94%	Belum terpenuhinya data dukung di setiap area penilaian	Pemenuhan data dukung yang dibutuhkan untuk menunjang penilaian
I.3	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	90	92,05	102%	Meskipun masih dalam kategori informatif tetapi skor KIP mengalami penurunan sebesar 2,51 dari nilai semula tahun 2023 yaitu 94,56. Hal ini dikarenakan capaian nilai pada publikasi website dan medsos ppid kurang maksimal.	Peningkatan ketepatan waktu dan jumlah informasi publik yang dipublikasikan pada website dan medsos, serta peningkatan inovasi pengelolaan sistem informasi publik .
I.4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektor	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektor	65	100	154%	Kesadaran dan partisipasi OPD dalam pengelolaan data statistik sektoral sudah meningkat meskipun masih perlu dilakukan pendampingan secara rutin	Melakukan fasilitasi dan pendampingan pada tiap OPD sehingga jika terdapat kendala terkait pengelolaan data statistik sektoral dapat segera diselesaikan

3.1.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumber daya keuangan setiap indikator sasaran dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Tujuan : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	3,32	3,99	120%				
	Sasaran :							
I.1	Terwujudnya Manajemen Dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien	3,06	4,40	144%	370.000.000	361.065.039	98%	8.934.961
		2,66	3,70	139%				
		2,24	2,64	118%				
		3,69	4,52	122%				
I.2	Terwujudnya Perlindungan Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	310	292	94%	33.500.000	28.078.000	84%	5.422.000
I.3	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	90	92,05	102%	754.000.000	735.657.709	98%	18.342.291
I.4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	65	100	154%	130.000.000	122.039.062	94%	7.960.938
	Program Penunjang				5.238.561.980	4.953.204.090	95%	285.357.890
	Jumlah Anggaran				6.526.061.980	6.200.043.900	95%	326.018.080

Berdasarkan tabel 3.7, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang memiliki tujuan strategis yaitu “Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah” dengan indikator kinerja “Indeks SPBE”. Nilai SPBE Kabupaten Rembang Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah 3,99 dengan predikat ”sangat baik” melebihi target kinerja yang tertuang dalam Renstra untuk tahun 2024 sebesar 3,32. Sedangkan anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung tujuan strategis tersebut sebesar Rp6.526.061.980,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.200.043.900,00 atau 95% dan efisiensi anggaran sebesar Rp326.018.080,00 atau 5%.

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Efisiensi} &= 100\% - \frac{(\text{Realisasi Biaya} \times 100\%)}{\text{Target Biaya}} \\
 &= 100\% - \frac{(\text{Rp6.200.043.900,00} \times 100\%)}{\text{Rp6.526.061.980,00}} \\
 &= 100\% - 95\% \\
 &= 5\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Efektivitas} &= \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\
 \text{(Indeks SPBE)} &= \frac{3,99}{3,30} \times 100\% \\
 &= 121\%
 \end{aligned}$$

Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya keuangan setiap sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Terwujudnya Manajemen Dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien

Anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung sasaran 1 sebesar Rp370.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp361.065.039,00 atau 98% dan efisiensi anggaran sebesar Rp8.934.961,00 atau 2%.

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Efisiensi} &= 100\% - \frac{(\text{Realisasi Biaya} \times 100\%)}{\text{Target Biaya}} \\
 &= 100\% - \frac{(\text{Rp361.065.039,00} \times 100\%)}{\text{Rp370.000.000,00}} \\
 &= 100\% - 98\% \\
 &= 2\%
 \end{aligned}$$

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
1. \text{ Indeks Kebijakan} &= \frac{4,40}{3,06} \times 100\% \\
&= 144\% \\
2. \text{ Indeks Tatakelola} &= \frac{3,70}{2,66} \times 100\% \\
&= 139\% \\
3. \text{ Indeks Penerapan} &= \frac{2,64}{2,24} \times 100\% \\
\text{Manajemen} &= 118\% \\
4. \text{ Indeks Layanan} &= \frac{4,52}{3,69} \times 100\% \\
&= 122\%
\end{aligned}$$

Sasaran 2 : Terwujudnya Perlindungan Terhadap Informasi Pemerintah Daerah

Anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung sasaran 2 sebesar Rp33.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp28.078.000,00 atau 84% dan efisiensi anggaran sebesar Rp5.422.000,00 atau 16%.

$$\begin{aligned}
\text{Tingkat Efisiensi} &= 100\% - \frac{(\text{Realisasi Biaya} \times 100\%)}{\text{Target Biaya}} \\
&= 100\% - \frac{(\text{Rp}28.078.000,00 \times 100\%)}{\text{Rp}33.500.000,00} \\
&= 100\% - 84\% \\
&= 16\%
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Tingkat Efektivitas} &= \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\
\text{Indeks KAMI} &= \frac{292}{310} \times 100\% \\
\text{(Keamanan Informasi)} &= 94\%
\end{aligned}$$

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik

Anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung sasaran 3 sebesar Rp754.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp735.657.709,00 atau 98% dan efisiensi anggaran sebesar Rp18.342.291,00 atau 2%.

$$\begin{aligned}
\text{Tingkat Efisiensi} &= 100\% - \frac{(\text{Realisasi Biaya} \times 100\%)}{\text{Target Biaya}} \\
&= 100\% - \frac{(\text{Rp}735.657.709,00 \times 100\%)}{\text{Rp}754.000.000,00} \\
&= 100\% - 98\% \\
&= 2\%
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Tingkat Efektivitas} &= \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\
\text{Skor KIP} &= \frac{92,05}{90} \times 100\% \\
\text{(Keterbukaan} & \\
\text{Informasi Publik)} &= 102\%
\end{aligned}$$

Sasaran 4 : Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral

Anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung sasaran 4 sebesar Rp130.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp122.039.062,00 atau 94% dan efisiensi anggaran sebesar Rp7.960.938,00 atau 6%.

$$\begin{aligned}
\text{Tingkat Efisiensi} &= 100\% - \frac{(\text{Realisasi Biaya} \times 100\%)}{\text{Target Biaya}} \\
&= 100\% - \frac{(\text{Rp}122.039.062,00 \times 100\%)}{\text{Rp}130.000.000,00} \\
&= 100\% - 94\% \\
&= 6\%
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Tingkat Efektivitas} &= \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\
\text{Persentase Ketersediaan} &= \frac{100}{65} \times 100\% \\
\text{Data Statistik Sektoral} &= 154\%
\end{aligned}$$

Tabel 3.8
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	73	61,42	84%	5.238.561.980	4.953.204.090	95%	285.357.890
		Nilai IKM	83	89,73	108%				
		Persentase ketercapaian pelayanan umum	100%	100%	100%				
1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan	100%	100%	100%	41.030.000	40.451.000	99%	579.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	2 dokumen	2 dokumen	100%	3.490.099.980	3.323.557.909	95%	166.542.071
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	157.250.000	132.392.702	84%	24.857.298
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang kantor dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan	100%	100%	100%	1.474.997.000	1.393.250.287	94%	81.746.713
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peralatan dan Mesin Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100%	100%	100%	75.185.000	63.552.192	85%	11.632.808

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase cakupan pelayanan informasi publik	100%	100%	100%	754.000.000	735.657.709	98%	18.342.291
1	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi publik yang disajikan badan publik kabupaten dan OPD	100%	100%	100%	754.000.000	735.657.709	98%	18.342.291
C	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan	100%	100%	100%	370.000.000	361.065.039	98%	8.934.961
1	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan OPD dan desa yang menggunakan domain dan sub domain rembangkab.go.id	335 domain (40 OPD, 1 BLUD dan 294 Desa)	335 domain (40 OPD, 1 BLUD dan 294 Desa)	100%	30.000.000	29.502.780	98%	497.220
2	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tata kelola SPBE	4 layanan : 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	4 layanan : 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	100%	340.000.000	331.562.259	98%	8.437.741

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase publikasi data statistik sektoral	100%	100%	100%	130.000.000	122.039.062	94%	7.960.938
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyusun data statistik/berkontribusi dalam sistem satu data	40 OPD	40 OPD	100%	130.000.000	122.039.062	94%	7.960.938
E	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase cakupan pengamanan informasi	100%	100%	100%	33.500.000	28.078.000	84%	5.422.000
1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya	100%	100%	100%	33.500.000	28.078.000	84%	5.422.000
	Jumlah Anggaran					6.526.061.980	6.200.043.900	95%	326.018.080

3.1.8 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel di bawah ini:

Tabel 3.9
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kerja	% Capaian	Program/ kegiatan	Indikator Kerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Tujuan : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indikator Tujuan : Indeks SPBE	120%					
	Sasaran :	Indikator Sasaran :						
I.1	Terwujudnya Manajemen Dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien	Indeks Kebijakan Indeks Tata Kelola Indeks Penerapan Manajemen Indeks Layanan	144% 139% 118% 122%	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan	100%	Menunjang	Secara umum OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sudah terkoneksi dengan jaringan. Akan tetapi masih ada kendala yaitu kurang optimalnya perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan yang terkoneksi ke OPD. Untuk itu ke depan perlu dilakukan : peningkatan kapasitas jaringan dan penganggaran yang ideal dalam rangka pemeliharaan infrastruktur
				Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan OPD dan desa yang menggunakan domain dan sub domain rembangkab.go.id	100%	Menunjang	Semua OPD dan desa di lingkup Pemerintah Kabupaten Rembang telah menggunakan domain dan sub domain rembangkab.go.id. Terkait penggunaan domain tersebut, ada kendala di OPD yaitu

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kerja	% Capaian	Program/ kegiatan	Indikator Kerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								kurang maksimalnya pemanfaatan domain rembangkab.go.id pada OPD yang disebabkan oleh kapasitas SDM yang belum memadai. Untuk itu dibutuhkan pelatihan teknis bagi operator website OPD dan sertifikasi kompetensi.
				Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tata kelola SPBE	100%	Menunjang	Ada 4 layanan : 1.Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah Untuk memaksimalkan layanan tersebut, perlu penganggaran yang ideal.
I.2	Terwujudnya Perlindungan Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	94%	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase cakupan pengamanan informasi	100%	Menunjang	Keamanan Informasi Pemerintah Daerah merupakan sesuatu yang urgent dan vital. Untuk menjamin dan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi, maka pada tahun 2024,ditetapkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 31 Tahun 2024 TentangManajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
				Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya	100	Menunjang	Capaian kegiatan ini dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti Informasi yang Cepat dan Akurat, Keamanan Data dan Informasi. Hasilnya cukup baik.

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kerja	% Capaian	Program/ kegiatan	Indikator Kerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.3	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	102%	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase cakupan pelayanan informasi publik	100%	Menunjang	Cakupan pelayanan informasi publik sudah bagus, tetapi ada beberapa kekurangan yaitu terkait pengelolaan website, media sosial dan dokumen informasi publik yang belum optimal. Untuk itu diperlukan money pengelolaan website dan SOP mekanisme permohonan informasi, keberatan dan sengketa informasi.
				Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi publik yang disajikan badan publik kabupaten dan OPD	100%	Menunjang	Semua OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Rembang, telah menyajikan dan mempublikasikan data publik sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik.
I.4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	154%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase publikasi data statistik sektoral	100%	Menunjang	Pada tahun 2024 telah disusun "Buku Statistik Sektoral Kabupaten Rembang" dan telah dipublikasikan serta sudah dapat diakses oleh publik
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyusun data statistik/berkontribusi dalam sistem satu data	100%	Menunjang	Semua OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Rembang, dengan didampingi BPS terlibat dan berkontribusi dalam Sistem Satu Data
II	Program Penunjang			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	84%	Menunjang	Program ini memiliki fungsi penunjang dalam mewujudkan target tujuan dan sasaran OPD. Hasil kinerja program ini cukup baik. Untuk memaksimalkan pelayanan dalam menunjang kinerja OPD, ke depan penganggaran yang lebih ideal.
					Nilai IKM	108%		
					Persentase ketercapaian pelayanan umum	100%		

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kerja	% Capaian	Program/ kegiatan	Indikator Kerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan	100%	Menunjang	Kegiatan ini terdiri dari : penyusunan dokumen perencanaan, dokumen anggaran, laporan evaluasi dan laporan SAKIP dengan hasil kinerja cukup berhasil.
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100%	Menunjang	Kegiatan ini terdiri dari : Penyediaan gaji dan TPP bagi, penatausahaan bagi pengelola keuangan dan penyusunan laporan keuangan dengan Hasil kinerja cukup berhasil.
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Menunjang	Hasil kinerja kegiatan ini cukup baik, walaupun kurang maksimal. Agar lebih baik perlu anggaran yang memadai melalui pengalokasian anggaran yang efektif.
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang kantor dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan	100%	Menunjang	Kegiatan terdiri dari jasa pembayaran THL, Listrik, Internet dan surat menyurat. Pada Kegiatan ini secara umum telah dilakukan dengan semaksimal mungkin. Ke depan perlu peningkatan anggaran untuk menunjang kegiatan tersebut.
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peralatan dan Mesin Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100%	Menunjang	Kegiatan terdiri dari pemeliharaan rutin, perbaikan dan pemeliharaan secara umum telah dilakukan dengan anggaran yang minimalis. Ke depan perlu peningkatan anggaran untuk pemeliharaan BMD tersebut

Adapun realisasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024 secara lebih rinci pada tingkat program/kegiatan/sub. Kegiatan dijelaskan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Capaian Kinerja Program Kegiatan dan Sub. Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian
1	2	3	4	5	6
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
I	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika				
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Rumus : Jumlah Nilai komponen = Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi (hasil Review Inspektorat Kabupaten)	73	61.42	84%
		Nilai IKM Rumus : ((Nilai Persepsi per Unsur / Total Unsur yang Terisi) x Nilai Penimbang) x Nilai Dasar	83	89.73	108%
		Persentase ketercapaian pelayanan umum Rumus : (Jumlah layanan umum yang dilaksanakan oleh OPD / Jumlah layanan umum ideal yang dilaksanakan oleh OPD) x 100 %	100%	100%	100%
1)	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan Rumus : (Jumlah indikator kinerja dokumen perencanaan OPD/ Jumlah indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian pada dokumen perencanaan kabupaten) x 100%	100%	100%	100%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100%
2	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian
1	2	3	4	5	6
3	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan	100%
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	100%
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik Rumus : Jumlah laporan/dokumen keuangan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100%
1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang	32 orang	100%
2	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%
3	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
3)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Rumus : (Jumlah layanan administrasi perkantoran yang dipenuhi/Jumlah layanan administrasi perkantoran yang ada) x 100%	100%	100%	100%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
6	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100%
7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	100%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian
1	2	3	4	5	6
4)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang kantor dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Rumus : (Jumlah jasa penunjang OPD yang dilaksanakan / Jumlah jasa penunjang ideal OPD) x 100%	100%	100%	100%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100%
5)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peralatan dan Mesin Barang Milik Daerah yang Dipelihara Rumus : (Jumlah peralatan dan mesin, barang milik OPD yang dipelihara / Jumlah peralatan dan mesin, barang milik OPD yang dikelola) x 100%	100%	100%	100%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit	20 unit	100%
2	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 unit	35 unit	100%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 unit	18 unit	100%
B	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase cakupan pelayanan informasi publik Rumus : (Jumlah informasi yang dipublikasikan di website perangkat daerah / Total jumlah Informasi publik OPD) x 100%	100%	100%	100%
1)	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase informasi publik yang disajikan badan publik kabupaten dan OPD Rumus : (Jumlah informasi publik yang disajikan oleh badan publik dan OPD / Total jumlah keseluruhan informasi badan publik dan OPD) x 100%	100%	100%	100%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2 dokumen	2 dokumen	100%
2	Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 dokumen	12 dokumen	100%
3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 dokumen	1 dokumen	100%
4	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 dokumen	12 dokumen	100%
5	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 layanan	1 layanan	100%
6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 dokumen	1 dokumen	100%
C	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan Rumus : (Jumlah Perangkat Daerah yang saling terkoneksi di Jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses Internet yang disediakan oleh dinas kominfo) / (Total jumlah Perangkat Daerah) x 100%	100%	100%	100%
1)	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan OPD dan desa yang menggunakan domain dan sub domain rembangkab.go.id Rumus : (Jumlah Perangkat Daerah dan Desa yang menggunakan domain dan sub domain rembangkab. go.Id) / (Total Jumlah Perangkat Daerah) x 100%	335 domain (40 OPD, 1 BLUD dan 294 Desa)	335 domain (40 OPD, 1 BLUD dan 294 Desa)	100%
1	Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%
2)	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tata kelola SPBE Rumus : Jumlah layanan tata kelola SPBE yang diampu pemerintah daerah	4 layanan : 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	4 layanan : 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	100%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%
3	Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas Dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 dokumen	1 dokumen	100%
II Urusan Pemerintahan Bidang Statistik					100%
D	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase publikasi data statistik sektoral Rumus : (Jumlah data statistik sektoral yang dipublikasikan / Total jumlah data statistik sektoral yang tersedia) x 100%	100%	100%	100%
1)	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyusun data statistik/berkontribusi dalam sistem satu data Rumus : Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Rembang	40 OPD	40 OPD	100%
1	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	15 dokumen	15 dokumen	100%
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	40 OPD	40 OPD	100%
III Urusan Pemerintahan Bidang Persandian					100%
E	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase cakupan pengamanan informasi Rumus : (Jumlah aplikasi/website milik pemda yang diamankan / Total jumlah aplikasi /website milik pemda yang dikelola) x 100%	100%	100%	100%
1)	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya Rumus : (Jumlah berita daerah yang terjaga keamanannya / Total jumlah berita daerah yang dikelola) x 100%	100%	100%	100%
1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan	1 laporan	100%

Secara umum persentase realisasi kinerja pada tingkat program/kegiatan/sub.kegiatan mencapai 100%. Keberhasilan ini patut disyukuri, mengingat di tahun 2024, akibat defisit APBD Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan kebijakan refocusing anggaran yang berimplikasi pada pengurangan anggaran kegiatan di setiap perangkat daerah, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang. Untuk menghadapi kondisi ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang melakukan kebijakan penghematan dan efisiensi anggaran. Penggunaan anggaran hanya digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas, yang benar-benar menunjang kinerja pelayanan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika. Kegiatan utama yang harus tetap dianggarkan untuk menunjang kegiatan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika diantaranya :

- a. Penyediaan jasa bulanan ISP (*Internet Service Provider*) yang berguna untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pemerintahan, meliputi : akses informasi, transparansi, pelayanan publik online, E-Government serta keamanan informasi;
- b. Fasilitasi pemberitaan kegiatan pemerintah daerah;
- c. Fasilitasi penyediaan data statistik sektoral; dan
- d. Fasilitasi persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten.

Sedangkan perbandingan kinerja program/kegiatan/sub.Kegiatan tahun 2024 dengan kinerja 2 tahun sebelumnya (2022 dan 2023) disajikan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub. Kegiatan Tahun 2022 – 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar										
I	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika										
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	72	71.12	99%	72	75.26	105%	73	61.42	84%
		Nilai IKM	82	81.38	99%	82	81.75	100%	83	89.73	108%
		Persentase ketercapaian pelayanan umum	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen : 1. Renja Induk 2023 2. Renja Perubahan 2022	2 dokumen : 1. Renja Induk 2023 2. Renja Perubahan 2022	100%	2 dokumen : 1. Renja Induk 2024 2. Renja Perubahan 2023	2 dokumen : 1. Renja Induk 2024 2. Renja Perubahan 2023	100%	2 dokumen : 1. Renja Induk 2025 2. Renja Perubahan 2024	2 dokumen : 1. Renja Induk 2025 2. Renja Perubahan 2024	100%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen : 1. RKA Induk 2023 2. RKA Perubahan 2022	2 dokumen : 1. RKA Induk 2023 2. RKA Perubahan 2022	100%	2 dokumen : 1. RKA Induk 2024 2. RKA Perubahan 2023	2 dokumen : 1. RKA Induk 2024 2. RKA Perubahan 2023	100%	2 dokumen : 1. RKA Induk 2025 2. RKA Perubahan 2024	2 dokumen : 1. RKA Induk 2025 2. RKA Perubahan 2024	100%
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan : 1. LKJIP 2. LKPJ dan LPPD 3. Lap SPIP	3 laporan : 1. LKJIP 2. LKPJ dan LPPD 3. Lap SPIP	100%	3 laporan : 1. LKJIP 2. LKPJ dan LPPD 3. Lap SPIP	3 laporan : 1. LKJIP 2. LKPJ dan LPPD 3. Lap SPIP	100%	3 laporan : 1. LKJIP 2. LKPJ dan LPPD 3. Lap SPIP	3 laporan : 1. LKJIP 2. LKPJ dan LPPD 3. Lap SPIP	100%
d	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan : 1. Lap. Evaluasi Semester I 2. Lap. Evaluasi Semester II	2 laporan : 1. Lap. Evaluasi Semester I 2. Lap. Evaluasi Semester II	100%	2 laporan : 1. Lap. Evaluasi Semester I 2. Lap. Evaluasi Semester II	2 laporan : 1. Lap. Evaluasi Semester I 2. Lap. Evaluasi Semester II	100%	2 laporan : 1. Lap. Evaluasi Semester I 2. Lap. Evaluasi Semester II	2 laporan : 1. Lap. Evaluasi Semester I 2. Lap. Evaluasi Semester II	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	3 dokumen : 1. Laporan pengelolaan Gaji 2. Laporan Pengelolaan Penatausahaan SPJ 3. Lap. Keuangan	3 dokumen : 1. Laporan pengelolaan Gaji 2. Laporan Pengelolaan Penatausahaan SPJ 3. Lap. Keuangan	100%	3 dokumen : 1. Laporan pengelolaan Gaji 2. Laporan Pengelolaan Penatausahaan SPJ 3. Lap. Keuangan	3 dokumen : 1. Laporan pengelolaan Gaji 2. Laporan Pengelolaan Penatausahaan SPJ 3. Lap. Keuangan	100%	2 dokumen : 1. Laporan Pengelolaan Penatausahaan SPJ dan gaji 2. Lap. Keuangan	2 dokumen : 1. Laporan Pengelolaan Penatausahaan SPJ dan gaji 2. Lap. Keuangan	100%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang	33 orang	100%	33 orang	33 orang	100%	32 orang	32 orang	100%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b	Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen : 1. Laporan Perbendaharaan Bendahara Pengeluaran 2. Laporan Perbendaharaan Bendahara Penerimaan 3. Laporan Perbendaharaan Pembantu Bendahara Pengeluaran	3 dokumen : 1. Laporan Perbendaharaan Bendahara Pengeluaran 2. Laporan Perbendaharaan Bendahara Penerimaan 3. Laporan Perbendaharaan Pembantu Bendahara Pengeluaran	100%	3 dokumen : 1. Laporan Perbendaharaan Bendahara Pengeluaran 2. Laporan Perbendaharaan Bendahara Penerimaan 3. Laporan Perbendaharaan Pembantu Bendahara Pengeluaran	3 dokumen : 1. Laporan Perbendaharaan Bendahara Pengeluaran 2. Laporan Perbendaharaan Bendahara Penerimaan 3. Laporan Perbendaharaan Pembantu Bendahara Pengeluaran	100%	3 dokumen : 1. Laporan Perbendaharaan Bendahara Pengeluaran 2. Laporan Perbendaharaan Bendahara Penerimaan 3. Laporan Perbendaharaan Pembantu Bendahara Pengeluaran	3 dokumen : 1. Laporan Perbendaharaan Bendahara Pengeluaran 2. Laporan Perbendaharaan Bendahara Penerimaan 3. Laporan Perbendaharaan Pembantu Bendahara Pengeluaran	100%
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1. Laporan Keuangan TA 2022	1. Laporan Keuangan TA 2022	100%	1. Laporan Keuangan TA 2023	1. Laporan Keuangan TA 2023	100%	1. Laporan Keuangan TA 2024	1. Laporan Keuangan TA 2024	100%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
b	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
e	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
f	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
g	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
h	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100%	12	12	100%	1	1	100%
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang kantor dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	100%	1	1	100%	12	12	100%
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peralatan dan Mesin Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	20	100%	20	20	100%	20	20	100%
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	35	100%	35	35	100%	35	35	100%
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi							1	1	100%
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	18	18	100%	18	18	100%	18	18	100%
B	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi publik yang disajikan badan publik kabupaten dan OPD	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan pengelolaan informasi publik	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
a	Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Laporan Tahunan Wadul Bupati (LAPOR SP4N) Tahun 2022	1 Laporan Tahunan Wadul Bupati (LAPOR SP4N) Tahun 2022	100%	1 Laporan Tahunan Wadul Bupati (LAPOR SP4N) Tahun 2023	1 Laporan Tahunan Wadul Bupati (LAPOR SP4N) Tahun 2023	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b	Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1. Dokumen pengelolaan media komunikasi publik Tahun 2022 2. Dokumen strategi komunikasi Tahun 2022	1. Dokumen pengelolaan media komunikasi publik Tahun 2022 2. Dokumen strategi komunikasi Tahun 2022	100%	1 Dokumen pengelolaan media komunikasi publik Tahun 2023	1 Dokumen pengelolaan media komunikasi publik Tahun 2023	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
c	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen Kinerja Operasional LPPL CB FM Tahun 2022	1 Dokumen Kinerja Operasional LPPL CB FM Tahun 2022	100%	1 Dokumen Kinerja Operasional LPPL CB FM Tahun 2023	1 Dokumen Kinerja Operasional LPPL CB FM Tahun 2023	100%	1 Dokumen Kinerja Operasional LPPL CB FM Tahun 2024	1 Dokumen Kinerja Operasional LPPL CB FM Tahun 2024	100%
d	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Laporan Layanan Informasi Publik 2022	1 Laporan Layanan Informasi Publik 2022	100%	1 Laporan Layanan Informasi Publik 2023	1 Laporan Layanan Informasi Publik 2023	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
e	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Laporan Media Relations Tahun 2022	1 Laporan Media Relations Tahun 2022	100%	1 Laporan Media Relations Tahun 2023	1 Laporan Media Relations Tahun 2023	100%	1 Laporan Media Relations Tahun 2024	1 Laporan Media Relations Tahun 2024	100%
f	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Laporan Pelaksanaan Pertunjukan Rakyat melalui Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) Tahun 2022 2. Festival Pertunra (Pertunjukan Rakyat)	1 Laporan Pelaksanaan Pertunjukan Rakyat melalui Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) Tahun 2022 2. Festival Pertunra (Pertunjukan Rakyat)	100%	1 Laporan Pelaksanaan Pertunjukan Rakyat melalui Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) Tahun 2023	1 Laporan Pelaksanaan Pertunjukan Rakyat melalui Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) Tahun 2023	100%	1 Laporan Pelaksanaan Pertunjukan Rakyat melalui Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) Tahun 2024	1 Laporan Pelaksanaan Pertunjukan Rakyat melalui Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) Tahun 2024	100%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan OPD dan desa yang menggunakan domain dan sub domain rembangkab.go.id	335 domain (40 OPD, 1 BLUD dan 294 Desa)	335 domain (40 OPD, 1 BLUD dan 294 Desa)	100%	335 domain (40 OPD, 1 BLUD dan 294 Desa)	335 domain (40 OPD, 1 BLUD dan 294 Desa)	100%	335 domain (40 OPD, 1 BLUD dan 294 Desa)	335 domain (40 OPD, 1 BLUD dan 294 Desa)	100%
a	Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan Kegiatan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Tahun 2022	1 Laporan Kegiatan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Tahun 2022	100%	1 Laporan Kegiatan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Tahun 2023	1 Laporan Kegiatan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Tahun 2023	100%	1 Laporan Kegiatan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Tahun 2024	1 Laporan Kegiatan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Tahun 2024	100%
2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tata kelola SPBE	4 layanan : 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	4 layanan : 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	100%	4 layanan : 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	4 layanan : 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	100%	4 layanan : 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	4 layanan : 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	100%
a	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Laporan Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Kab. Rembang Tahun 2022	1 Laporan Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Kab. Rembang Tahun 2022	100%	1 Laporan Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Kab. Rembang Tahun 2023	1 Laporan Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Kab. Rembang Tahun 2023	100%	1 Laporan Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Kab. Rembang Tahun 2024	1 Laporan Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Kab. Rembang Tahun 2024	100%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Laporan Pemantauan Dan Pemeliharaan Jaringan Fiber Optic (FO)Tahun 2022	1 Laporan Pemantauan Dan Pemeliharaan Jaringan Fiber Optic (FO)Tahun 2022	100%	1 Laporan Pemantauan Dan Pemeliharaan Jaringan Fiber Optic (FO)Tahun 2023	1 Laporan Pemantauan Dan Pemeliharaan Jaringan Fiber Optic (FO)Tahun 2023	100%	1 Laporan Pemantauan Dan Pemeliharaan Jaringan Fiber Optic (FO)Tahun 2024	1 Laporan Pemantauan Dan Pemeliharaan Jaringan Fiber Optic (FO)Tahun 2024	100%
c	Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas Dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen (Buku 4 Quick Win Smart City) Tahun 2022	1 Dokumen (Buku 4 Quick Win Smart City) Tahun 2022	100%	1 Dokumen Quick Win Tahun 2023	1 Dokumen Quick Win Tahun 2023	100%	1 Dokumen Quick Win Tahun 2024	1 Dokumen Quick Win Tahun 2024	100%
II Urusan Pemerintahan Bidang Statistik											
A	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase publikasi data statistik sektoral	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyusun data statistik/ berkontribusi dalam sistem satu data	40 OPD	40 OPD	100%	40 OPD	40 OPD	100%	40 OPD	40 OPD	100%
a	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen Publikasi Data Statistik Sektoral Tahun 2022	1 Dokumen Publikasi Data Statistik Sektoral Tahun 2022	100%	1. Forum satu data 2. Desk daftar data	1. Forum satu data 2. Desk daftar data	100%	15 dokumen	15 dokumen	100%
b	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS							40 OPD	40 OPD	100%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian										
A	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase gangguan keamanan sistem informasi yang terselesaikan (persentase cakupan pengamanan informasi)	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
a	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Tahun 2022	1 Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Tahun 2022	100%	1 Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Tahun 2023	1 Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Tahun 2023	100%	1 Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Tahun 2024	1 Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Tahun 2024	100%

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Manajemen Dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien	Indeks Kebijakan	3,06	4,40	144%	370.000.000	361.065.039	98%	8.934.961
		Indeks Tata Kelola	2,66	3,70	139%				
		Indeks Penerapan Manajemen	2,24	2,64	118%				
		Indeks Layanan	3,69	4,52	122%				
2	Terwujudnya Perlindungan Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	310	292	94%	33.500.000	28.078.000	84%	5.422.000
3	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	90	92,05	102%	754.000.000	735.657.709	98%	18.342.291
4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	65	100	154%	130.000.000	122.039.062	94%	7.960.938

Adapun realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5
*	Pendapatan Dinas Komunikasi Dan Informatika	175.000.000	0	0,0%
	Hasil Retribusi Daerah	175.000.000	0	0,0%
	Retribusi Jasa Usaha	175.000.000	0	0,0%
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	175.000.000	0	0,0%
	Retribusi Pemakaian Alat	175.000.000	0	0,0%

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5
*	Belanja Dinas Komunikasi Dan Informatika	6.526.061.980	6.200.043.900	95,0%
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	6.526.061.980	6.200.043.900	95,0%
I	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	6.362.561.980	6.049.926.838	95,1%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.238.561.980	4.953.204.090	94,6%
1)	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.030.000	40.451.000	98,6%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000	3.375.000	96,4%
2	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.430.000	1.430.000	100,0%
3	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.300.000	3.156.000	95,6%
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.800.000	32.490.000	99,1%
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.490.099.980	3.323.557.909	95,2%
1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	3.338.499.980	3.171.957.909	95,0%
2	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.600.000	150.600.000	100,0%
3	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	1.000.000	100,0%
3)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	157.250.000	132.392.702	84,2%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.570.000	9.871.600	93,4%
2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	45.680.000	40.884.000	89,5%
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	8.778.900	87,8%
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	18.047.000	90,2%
5	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	8.000.000	7.866.000	98,3%
6	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000	2.920.000	48,7%
7	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	11.588.100	77,3%
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	42.000.000	32.437.102	77,2%

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5
4)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.474.997.000	1.393.250.287	94,5%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.675.000	1.450.000	86,6%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	925.200.000	906.208.287	97,9%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	548.122.000	485.592.000	88,6%
5)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.185.000	63.552.192	84,5%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.000.000	31.267.192	86,9%
2	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	15.000.000	12.100.000	80,7%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.185.000	7.685.000	75,5%
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	14.000.000	12.500.000	89,3%
B	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	754.000.000	735.657.709	97,6%
1)	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	754.000.000	735.657.709	97,6%
1	Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	24.000.000	23.360.000	97,3%
2	Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	127.000.000	125.806.100	99,1%
3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	108.000.000	94.667.834	87,7%
4	Pelayanan Informasi Publik	40.000.000	39.517.700	98,8%
5	Layanan Hubungan Media	430.000.000	428.232.075	99,6%
6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas	25.000.000	24.074.000	96,3%
C	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	370.000.000	361.065.039	97,6%
1)	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	29.502.780	98,3%

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	30.000.000	29.502.780	98,3%
2)	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	340.000.000	331.562.259	97,5%
1	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	111.440.000	110.047.630	98,8%
2	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	208.560.000	202.669.129	97,2%
3	Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas Dan Kota Cerdas	20.000.000	18.845.500	94,2%
II	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	130.000.000	122.039.062	93,9%
D	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	130.000.000	122.039.062	93,9%
1)	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000	122.039.062	93,9%
1	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	30.000.000	23.647.499	78,8%
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	100.000.000	98.391.563	98,4%
III	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	33.500.000	28.078.000	83,8%
E	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	33.500.000	28.078.000	83,8%
1)	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	33.500.000	28.078.000	83,8%
1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik	33.500.000	28.078.000	83,8%

Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.526.061.980,00 dengan realisasi sebesar Rp6.200.043.900,00 dan sisa anggaran sebesar Rp326.018.080,00. Sedangkan persentase serapan anggaran sebesar 95% dengan tingkat efisiensi 5% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= 100\% - \frac{(\text{Realisasi Biaya} \times 100\%)}{\text{Target Biaya}} \\ &= 100\% - \frac{(\text{Rp6.200.043.900,00} \times 100\%)}{\text{Rp6.526.061.980,00}} \\ &= 100\% - 95\% \\ &= 5\% \end{aligned}$$

3.3. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. Pemanfaatan media sosial dan google untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi;
- b. Pemanfaatan aplikasi dan website untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

3.4 Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Rembang yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan Masyarakat, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Optimalisasi kinerja silang manajemen kolaboratif lintas sektor merupakan salah satu faktor pendukung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi *refocusing* dan rasionalisasi anggaran. Inventarisasi kegiatan lintas sektor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.14
Kegiatan Kolaboratif Lintas Sektor Yang Dilakukan (Crosscutting)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output Dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi OPD dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7
1	Evaluasi Indeks SPBE	Dinkominfo	Leading Sektor dan Operator Evaluasi	Dokumen Evaluasi Indeks SPBE	12 perangkat daerah	Meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat
		BPPKAD	Kebijakan penganggaran			
		Bagian Organisasi	Kebijakan organisasi dan reformasi birokrasi			
		Bagian Hukum	Penetapan peraturan /keputusan Bupati			
		Inspektorat	Layanan WBS			
		Dinarpus	Layanan Kearsipan			
		BKD	Layanan Kepegawaian			
		Bappeda	Layanan Perencanaan			
		Dinkes	Layanan Kesehatan			
		Bagian PBJ	Layanan Pengadaan Barang Jasa			
		Dindikcapil	Layanan Kependudukan			
		RSUD	Layanan Antrian Online			
2	Evaluasi Smart City	Dinkominfo	Leading Sektor dan Operator Evaluasi	Dokumen Evaluasi Smart City	15 perangkat daerah	Efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Dengan menggunakan teknologi seperti sensor dan Internet of Things (IoT), kota pintar dapat memantau dan mengelola penggunaan energi, air, dan sumber daya lainnya secara lebih efektif.
			Perencanaan dan Inovasi			
			Inovasi Layanan Virtual Museum			
			Inovasi Layanan Kependudukan			
			Inovasi Layanan GASPOL12			
			Inovasi Layanan UMKM			
			Inovasi Layanan Kesehatan			
			Inovasi Layanan Ketenagakerjaan			
			Inovasi Layanan Istri Mantap			
			Inovasi Layanan KIR			
			Inovasi Layanan RDF Pengelolaan Sampah			
			Inovasi Bidang Kelautan dan Konservasi Mangrove			
			Inovasi Layanan Antrian Online			
			Inovasi Layanan Investasi dan Penanaman Modal			
			Inovasi Layanan Rumah Tidak Layak Huni			
3	Rapat Koordinasi PPID	Dindikpora	Fasilitasi sengketa informasi	Putusan sengketa informasi	1 perangkat daerah	Meningkatkan kerjasama dalam upaya memperkuat komitmen dengan langkah-langkah pengelolaan dan pelayanan informasi publik, serta mendorong keterbukaan informasi public
		Bagian Hukum	Penelaahan dan pengkajian masalah sengketa			

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output Dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi OPD dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7
4	Uji konsekuensi penetapan daftar informasi publik yang dikecualikan	40 perangkat daerah	Pengusulan daftar informasi publik yang dikecualikan	Penetapan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Berdasarkan Uji Konsekuensi Kabupaten Rembang	individu, kelompok masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Manfaat bagi OPD :menjadi pedoman dalam memberikan informasi publik yang harus di publikasikan dan tidak boleh dipublikasikan Manfaat bagi kelompok sasaran :mengetahui daftar informasi publik yang dikecualikan/tidak dapat diminta
5	Bimbingan Teknis dan Monev Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4NLAPOR!)	40 OPD	Pejabat pengelola pengaduan	Hasil evaluasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4NLAPOR!)	40 OPD	Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat
6	Publikasi Data Statistik Sektoral	Dinas Kominfo	Walidata Daerah (pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data statistik sektoral)	Buku Statistik Sektoral Kabupaten Rembang	40 OPD dan Masyarakat	Manfaat bagi OPD: Tersedianya data sektoral sehingga dapat digunakan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas Manfaat bagi Masyarakat: Tersedianya data statistik sektoral sebagai wujud transparansi dari pemerintah kepada Masyarakat
		BPS	Pembina Data			
		Bappeda	Koordinator Forum Satu Data (perencanaan data statistik sektoral)			
40 OPD	Produsen Data (mengumpulkan data statistik sektoral kepada walidata)					
7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Dinas Kominfo	Fasilitasi dan koordinasi kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	SDM Perangkat Daerah yang mendapat Pelatihan Statistik Sektoral	40 Kasubag Perencanaan Program/ Pengelola Data pada OPD	Manfaat bagi OPD: Meningkatnya kapasitas SDM pengelola data statistik pada tiap OPD sehingga Satu Data Statistik di lingkup Pemerintah Kabupaten Rembang dapat terkelola semakin baik dan menghasilkan data yang berkualitas. Manfaat bagi Masyarakat: Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas.
		BPS	Narasumber			
		DPUTARU	Narasumber			
		Bappeda	Narasumber			
		Dinas Kominfo Kota Magelang	Narasumber			
8	Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	BPS Pusat	Tim Penilai Badan	Indeks Pembangunan Statistik	Pemerintah Kabupaten Rembang	Manfaat bagi OPD: - Instansi pemerintah dapat menyelenggarakan kegiatan statistik dengan baik dan sesuai dengan standar/prinsip Satu Data Indonesia
		BPS Kabupaten Rembang	Pembina Data Daerah			
		Dinas Kominfo	Tim Penilai Internal			
		Bappeda	Tim Penilai Internal			
		BKD	Tim Penilai Internal			

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output Dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi OPD dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7
		OPD	Tim Penilai Internal dan Lokus Penilaian			<p>- Meningkatkan kualitas data statistik sektoral untuk pencapaian kebijakan di instansi pemerintah</p> <p>- Tercapainya tujuan Reformasi Birokrasi, Satu Data Indonesia, dan Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif, dan efisien</p> <p>Manfaat bagi Masyarakat: Pelayanan publik di bidang statistik semakin berkualitas</p>
9	Pembentukan TTIS (Tim Tanggap Insiden Siber)	Dinas Kominfo	<p>a.Penguat Kebijakan dan Regulasi</p> <p>b.Koordinasi dan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan</p> <p>c.Sosialisasi dan Literasi Keamanan Siber</p> <p>d.Pemulihan dan Evaluasi Pasca-Insiden</p>	Pembentukan RembangKab-CSIRT	40 OPD dan Masyarakat	<p>Manfaat bagi OPD : Meningkatkan Keamanan Sistem Informasi pada OPD, Respon cepat terhadap insiden siber, meningkatkan kesadaran dan literasi keamanan siber</p> <p>Manfaat bagi Masyarakat : Menjamin keamanan layanan publik digital, meningkatkan keasadaran dan literasi digital, Menjamin keamanan infrastruktur digital yang digunakan masyarakat</p>
		40 OPD	Agen Sibe (Respon cepat terhadap insiden siber pada masing-masing OPD)			

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024, merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*). Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu juga merupakan upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024 ini, dapat menggambarkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Secara umum dalam mendukung pencapaian kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp6.526.061.980,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp6.200.043.900,00 atau 95%. Anggaran sejumlah itu digunakan untuk membiayai pelaksanaan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024.

Hasil laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indikator Tujuan : Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
Target Indeks SPBE tahun 2024 sebesar 3,32 dengan realisasi 3,99 dan tingkat pencapaian 120% dengan predikat “sangat baik”.
2. Indikator Sasaran :
 - a. Indeks Kebijakan
Target indeks kebijakan tahun 2024 sebesar 3,06 dengan realisasi 4,40 dan tingkat pencapaian 144%.
 - b. Indeks Tata Kelola

Target indeks tata kelola tahun 2024 sebesar 2,66 dengan realisasi 3,70 dan tingkat pencapaian 139%.

c. Indeks Penerapan Manajemen

Target indeks penerapan manajemen tahun 2024 sebesar 2,24 dengan realisasi 2,64 dan tingkat pencapaian 118%.

d. Indeks Layanan

Target indeks layanan tahun 2024 sebesar 3,69 dengan realisasi 4,52 dan tingkat pencapaian 122%.

e. Indeks KAMI (Keamanan Informasi)

Target indeks KAMI tahun 2024 sebesar 310 dengan realisasi 292 dan tingkat pencapaian 94%.

f. Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)

Target skor KIP tahun 2024 sebesar 90 dengan realisasi 92,05 dan tingkat pencapaian 102% dengan kategori “Informatif”.

g. Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektor

Target Persentase ketersediaan data statistik sektoral tahun 2024 sebesar 65% dengan realisasi 100% dan tingkat pencapaian 154%.

Adapun Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah :

1. Belum tersedianya aplikasi permohonan informasi publik berbasis website dalam rangka pengembangan inovasi keterbukaan informasi;
2. Kurangnya SDM yang kompeten dalam menangani/memahami mekanisme pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR pada seluruh OPD;
3. Belum tersedianya aplikasi monitoring opini dan aspirasi publik melalui media massa untuk mengetahui isu-isu terkini secara tepat dan *realtime* sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan daerah;
4. Belum dilakukannya pembentukan kelembagaan kembali (re-organisasi) dan pengembangan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) sebagai mitra komunikasi kebijakan/program/kegiatan pemerintah;
5. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan program *Smart City*;
6. Belum adanya sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Rembang;
7. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi pengelolaan statistik di tiap OPD.

4.2 Rekomendasi

Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan antara lain :

1. Menyusun/menyediakan anggaran pembuatan aplikasi permohonan informasi berbasis website;
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, sertifikasi dan pendidikan tentang pelayanan informasi/pengelolaan aduan masyarakat maupun penyelenggaraan workshop dan seminar;
3. Menyusun/menyediakan anggaran sewa/pembuatan aplikasi monitoring opini dan aspirasi publik berupa aplikasi IMA (*Intelligence Media Analytics*) dan ISA (*Intelligence Socio Analitycs*);
4. Penyusunan kelembagaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) melalui penetapan SK Bupati serta pelatihan/workshop pengembangan KIM;
5. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan *smart city*;
6. Pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Rembang;
7. Peningkatan kapasitas SDM pengelola data statistik.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja kepada para *stakeholder* ataupun pihak lain yang berkontribusi dalam pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian dan merupakan bentuk perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip *good governance*.

Rembang, 31 Januari 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG



Drs. EC. GANTIARTO St
Prabina Utama Muda
NIP. 19651226 199401 1 001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Gatot Subroto No. 8 Rembang Telp. (0295) 6980754
Fax (0295) 6980754 Email : dinkominfo@rembangkab.go.id
web : <http://dinkominfo.rembangkab.go.id>
REMBANG – KODE POS 59212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 00.8 / 010 / 2025

T E N T A N G

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, maka perlu pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024 adalah :
- a. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024;
 - b. mengadakan koordinasi dengan Bidang dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024;
 - c. mengolah data dan merumuskan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024;
 - d. melakukan finalisasi data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 03 Januari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG


Drs. GANTIARTO St
Pambina Utama Muda
19651226 199401 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
Nomor : 00.8 / 010 / 2025
Tanggal : 03 Januari 2025

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
5.	Kepala Bidang Tata Kelola dan Layanan Informatika	Anggota
6.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Anggota
7.	3 (tiga) orang pelaksana	Anggota

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG


Drs. EC GANTIARTO St
Pembina Utama Muda
NIP. 19651226 199401 1 001

**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR SOP	:	900/11 /2025
TANGGAL PEMBUATAN	:	03 Januari 2025
TANGGAL REVISI	:	
TANGGAL PENGESAHAN	:	03 Januari 2025
DISAHKAN OLEH	:	 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG Dr. G. GANTIARTO St Pembina Utama Muda NIP. 19651226 199401 1 001
NAMA SOP	:	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

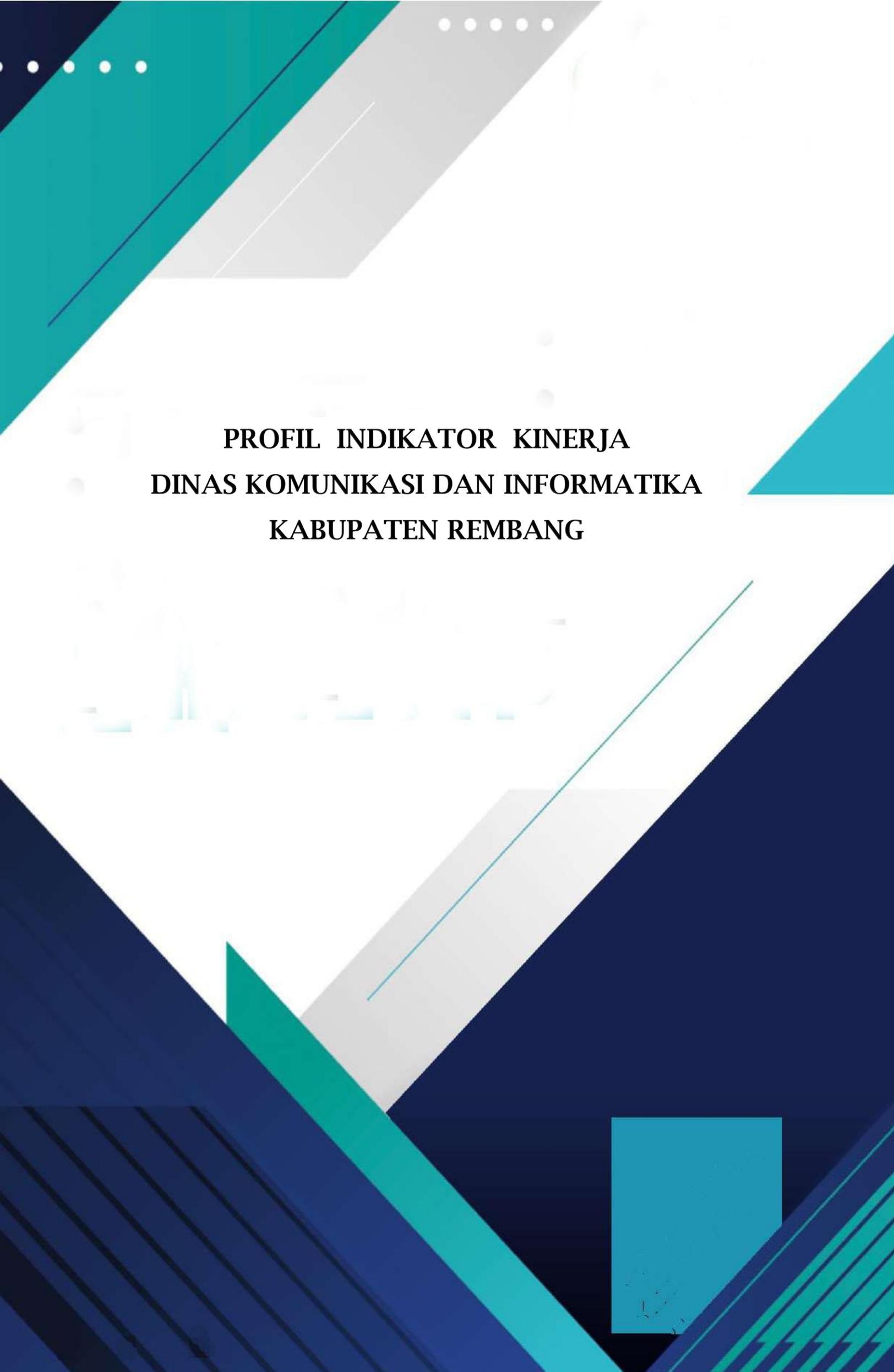
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah. 2. Memahami Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Mampu melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan capaian kinerja. 4. Cakap berkoordinasi, berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. 5. Mampu mengoperasikan komputer.
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pembentukan Tim Kerja. 2. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja. 3. SOP Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah. 4. SOP Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat komputer/lap top, proyektor, printer, dan scanner. 2. Jaringan Internet. 3. Alat Tulis Kantor (ATK).

PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<ol style="list-style-type: none">1. Penyampaian Dokumen LKjPD kepada Bupati dan Kementerian PANRB selambat-lambatnya pada akhir Bulan Februari.2. Melakukan pendataan harus sesuai dengan yang dibutuhkan, jika tidak maka pendataan tidak efektif dan tidak efisien.3. SOP bisa terlaksana apabila pejabat terkait berada di tempat dan siap melaksanakan tugas.4. Penyimpanan arsip Dokumen LKjPD yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai dengan standar.	<ol style="list-style-type: none">1. Notulen2. Daftar Hadir Rapat3. Data kinerja4. Draf LKjPD

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala PD	Sekretaris PD	Tim Penyusun LKjPD	Inspektorat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menelaah Surat Edaran Bupati Hal Penyusunan LKjPD dan memberikan arahan kepada Sekretaris PD untuk menyusun Tim Penyusun LKjPD dan menyiapkan rancangan LKjPD					Surat Edaran Bupati dan Lembar Disposisi	20 menit	Catatan/perintah tertulis	
2	Menerima disposisi dan arahan dari Kepala PD, menyusun Tim Penyusun LKjPD, dan mengoordinasikan rapat-rapat Tim Penyusun LKjPD.					SK Pembentukan Tim Penyusun LKjPD	2 hari	Surat Undangan Rapat	Pembentukan Tim sesuai SOP Pembentukan Tim Kerja.
3	<p>a. Melaksanakan rapat koordinasi persiapan penyusunan LKjPD dan pembagian tugas Tim.</p> <p>b. Menghimpun bahan/data yang dibutuhkan, mengolah data dan menganalisis, dan menyusun rancangan akhir LKjPD.</p> <p>c. Menyampaikan draf/rancangan akhir LKjPD kepada Inspektorat Daerah untuk dilakukan reviu.</p>					Bahan Rapat, Daftar Hadir, bahan/data yang dibutuhkan untuk penyusunan LKjPD	20 hari	Notulen, Daftar Pembagian Tugas, Draf/ rancangan akhir LKjIP, Surat Pengantar Permohonan Reviu	
4	Menerima rancangan akhir LKjPD, melakukan reviu dan menyampaikan hasil reviu kepada Tim Penyusun LKjPD.				 	Draf/ rancangan akhir LKjIP dan LHR	10 hari	Laporan Hasil Reviu (LHR)	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala PD	Sekretaris PD	Tim Penyusun LKjPD	Inspektorat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Memperbaiki rancangan akhir LKjPD berdasarkan hasil reuiu Inspektorat Daerah (jika ada), mencetak LKjPD hasil perbaikan, meneruskannya ke Sekretaris PD					Draft/rancangan akhir LKjPD dan Laporan Hasil Reuiu (LHR)	5 hari	Draf/ rancangan akhir LKjPD	
6	Memeriksa rancangan akhir LKjPD, memaraf dan meneruskannya ke Kepala PD					Draft/rancangan akhir LKjPD	1 hari	Draf/ rancangan akhir LKjPD	
7	Memeriksa rancangan akhir LKjPD dan menandatangani (menyetujui).		Tidak	Ya		Draf/rancangan akhir LKjPD	120 menit	Dokumen LKjPD	Jika Kepala PD menyetujui langsung membubuhkan tanda tangan. Jika Kepala PD tidak menyetujui dan memberikan koreksi, maka rancangan dikembalikan kepada Tim untuk diperbaiki.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala PD	Sekretaris PD	Tim Penyusun LKjPD	Inspektorat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	<p>a. Menyampaikan Dokumen LKjPD (<i>hard file</i>) kepada Bupati dan <i>soft file</i> ke Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rembang.</p> <p>b. Meng-upload Dokumen LKjPD pada aplikasi esr.menpan.go.id dan aplikasi Sapa Kinerja Kabupaten Rembang.</p>					Dokumen LKjPD	1 hari	Dokumen LKjPD	<i>Soft file</i>
9	Mendokumentasikan/mengarsipkan Dokumen LKjPD.					Dokumen LKjPD	15 menit	Dokumen LKjPD	<i>Hard file dan soft file.</i>



**PROFIL INDIKATOR KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG**

**PROFIL INDIKATOR KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG**

I. PROFIL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan Indikator : **Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja**
: **Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)**

A. Sasaran I : **Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien**

* **Pernyataan Outcome** : **Meningkatnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien**

Indikator Kinerja	: Indeks Kebijakan, Indeks tatakelola, Indeks penerapan manajemen, Indeks layanan
Definisi Indikator Kinerja	: Nilai yang mempresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang meliputi tingkat kematangan Kebijakan, Tata Kelola, Penerapan Manajemen, Layanan
Tujuan	: Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya
Rumus Pengukuran	: Penilaian hasil asesment KEMENPANRB Formulasi Indeks SPBE = (Indeks Kebijakan + Indeks Tata Kelola + Indeks Penerapan Manajemen + IndeksLayanan) /100 Formulasi Indeks (Kebijakan, Tata Kelola, Penerapan Manajemen, Layanan) = 1/BD X Jumlah (NA X BA) baca : 1/bobot domain x Jumlah (nilai aspek x bobot aspek)
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 4. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: a. kurangnya ketersediaan infrastruktur TIK b. permasalahan mengenai dukungan dan komitmen pimpinan c. permasalahan mengenai terbatasnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang Tata Kelola dan Layanan Informatika
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Kumulatif
Sumber data	: Hasil penilaian KEMENPAN RB

- B. Sasaran II** : **Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah**
- * **Pernyataan Outcome** : **Meningkatnya perlindungan terhadap keamanan informasi pemerintah daerah**

Indikator Kinerja	: Indeks KAMI (Keamanan Informasi)
Definisi Indikator Kinerja	: Nilai indeks untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah
Tujuan	: Untuk mengetahui kondisi keamanan informasi saat ini dimana Indeks KAMI merupakan tools untuk menentukan kondisi tingkat keamanan informasi yang merujuk pada SNI ISO/IEC 27001:2009 serta untuk memperbaiki, membangun, dan menjalankan keamanan informasi
Rumus Pengukuran	: Formulasi Indeks KAMI = Komponen Tata Kelola + Pengelolaan Risiko + Kerangka Kerja Keamanan Informasi + Pengelolaan Aset + Teknologi dan Keamanan Informasi
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara; 4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: a. Penilaian Mandiri belum dilakukan secara Formal yang mengacu pada Penilaian Indeks KAMI BSSN; b. Keterbatasan SDM
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang Statistik dan Persandian
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif sesuai yang tertuang dalam Renstra
Sumber data	: Hasil Laporan Penilaian Mandiri Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Kabupaten Rembang dilakukan secara mandiri

C. Sasaran III : Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)**

Indikator Kinerja	: Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)
Definisi Indikator Kinerja	: Nilai/ indeks untuk mengukur kepatuhan badan publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui layanan informasi publik
Tujuan	: 1 Mengukur kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik; 2 Menilai konsisten Badan Publik memberikan layanan informasi publik; 3 Mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik pada Badan Publik; 4 Menilai kategori kepatuhan keterbukaan informasi Badan Publik ; dan 5 Memberikan masukan (feed back) pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik.
Rumus Pengukuran	: Formulasi Indeks KIP = Website + Penilaian mandiri (SAQ) + Visitasi + Uji Publik
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: 1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: a. Kurangnya komitmen badan publik (ppid pelaksana) dalam mematuhi SOP/menyediakan jenis informasi yang harus dibuka; b. Kurang optimalnya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan layanan informasi termasuk kepatuhan penyediaan informasi pada website dan medsos OPD; c. Tidak adanya perlindungan berupa regulasi yang mengatur atas penyalahgunaan pemberian informasi kepada publik/masyarakat.
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif sesuai yang tertuang dalam Renstra
Sumber data	: OPD se- Kabupaten Rembang

D. Sasaran IV : Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya Indeks IPS (Indeks Pembangunan Statistik)**

Indikator Kinerja	: Persentase ketersediaan data statistik sektoral
Definisi Indikator Kinerja	: Persentase atau bagian dari seluruh data pembangunan yang bersifat numerik yang disediakan/dipublikasikan untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
Tujuan	: 1. Sebagai bahan masukan dalam publikasi data dan informasi pembangunan daerah; 2. Sebagai bukti Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sebagai Tulang Punggung Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan; 4. Sebagai Informasi Kinerja Pemerintahan dalam Pelaksanaan Pembangunan; 5. Sebagai Bahan Penelitian Bagi Mahasiswa; Sebagai Bukti Keterbukaan Informasi Pemerintah.
Rumus Pengukuran	: Formulasi Persentase ketersediaan data statistik sektoral = (Jumlah data statistik yang disajikan/ jumlah data statistik total) x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia; 2. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: a. Belum semua SKPD melakukan pengelola data secara baik/sistematis ; b. Keterbatasan SDM di masing-masing SKPD dalam Pengelola Data; c. Belum adanya aplikasi pengumpulan data.
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang Statistik dan Persandian
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif sesuai yang tertuang dalam Renstra
Sumber data	: OPD se- Kabupaten Rembang

II. PROFIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

- A Program** : **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
- * Pernyataan Outcome** : **Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi Dan Monitoring Kinerja OPD**

Indikator Kinerja	:	Nilai SAKIP OPD
Definisi Indikator Kinerja	:	SAKIP merupakan rangkaian aktivitas, alat, dan prosedur untuk mengukur dan mengelola kinerja pada instansi pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) yang dikenal juga dengan SAKIP.
Tujuan	:	Untuk menilai sejauh mana nilai SAKIP yang dicapai oleh Dinkominfo
Rumus Pengukuran	:	Jumlah Nilai komponen = Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi (hasil Review Inspektorat Kabupaten)
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; 5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Kurangnya pemahaman antar personal sehingga nilai SAKIP belum bisa optimal.
Cascading Indikator Kinerja		Sekretariat
Periode Pengukuran		Tahunan
Sifat Target		Tidak Kumulatif
Sumber data		Reviu Tim APIP, Hasil penilaian mandiri SAKIP

* **Pernyataan Outcome : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**

Indikator Kinerja	:	Nilai IKM OPD
Definisi Indikator Kinerja	:	Nilai IKM dilaksanakan dengan tujuan bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
Tujuan	:	Untuk menilai sejauh mana nilai IKM yang dicapai oleh Dinkominfo
Rumus Pengukuran	:	$((\text{Nilai Persepsi per Unsur} / \text{Total Unsur yang Terisi}) \times \text{Nilai Penimbang}) \times \text{Nilai Dasar}$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; 5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang; 6. Melaksanakan koordinasi dengan Bidang- bidang di lingkungan Dinkominfo dalam rangka meningkatkan nilai indeks kepuasan Masyarakat .
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Kurangnya Kapasitas SDM, tidak sesuai pendidikan/skill sehingga kurang maksimal dalam memberikan pelayanan publik.
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Hasil survey IKM

- 1 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- * Pernyataan Outcome : Meningkatnya capaian indikator kinerja sesuai dengan target**

Indikator Kinerja	:	Persentase indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan
Definisi Indikator Kinerja	:	Persentase tingkat keselarasan antara indikator dokumen perencanaan Dinkominfo dengan indikator dokumen perencanaan daerah
Tujuan	:	Untuk menilai sejauh mana capaian indikator kinerja sesuai dengan target.
Rumus Pengukuran	:	(Jumlah indikator kinerja dokumen perencanaan OPD/ Jumlah indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian pada dokumen perencanaan kabupaten) x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; 4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang; 5. Terdapat penganggaran dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Kurangnya kapasitas SDM dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Renja, DPA, RKA, Laporan Monev

2 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah**

Indikator Kinerja	:	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik
Definisi Indikator Kinerja	:	Dokumen pelaporan keuangan berguna sebagai bahan administrasi keuangan dan merupakan tugas rutin yang dilaksanakan oleh Sekretariat OPD dalam rangka memenuhi hak pegawai di bidang keuangan.
Tujuan	:	Untuk menilai sejauh mana pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah
Rumus Pengukuran	:	Jumlah laporan/dokumen keuangan yang disusun
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; 4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang; 5. Terdapatnya penganggaran dalam melaksanakan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah; 6. Melaksanakan koordinasi dengan Bidang Anggaran dan Bidang Perbendaharaan terkait perencanaan dan anggaran kas gaji, BKD terkait penganggaran gaji P3K, Inspektorat terkait Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Akhir Tahun.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	-
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan, setiap triwulanan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Laporan Gaji bulanan, Laporan SPJ, LHP

3 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**

Indikator Kinerja	:	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Definisi Indikator Kinerja	:	Manajemen perkantoran merupakan rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasi (mengatur dan menyusun), mengarahkan (memberikan arah dan petunjuk), mengawasi dan mengendalikan (melakukan kontrol) sampai menyelenggarakan secara tertib sesuai tujuan mengenai sesuatu hal atau kegiatan.
Tujuan	:	Memberikan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
Rumus Pengukuran	:	(Jumlah layanan administrasi perkantoran yang dipenuhi/Jumlah layanan administrasi perkantoran yang ada) x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; 3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang; 4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang; 5. Terdapatnya penganggaran dalam melaksanakan kegiatan administrasi umum perangkat daerah
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	-
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	SPJ kegiatan administrasi umum perangkat daerah.

4 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Indikator Kinerja	:	Persentase jasa penunjang kantor dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan
Definisi Indikator Kinerja	:	Pelayanan administrasi perkantoran merupakan penyediaan jasa pihak ketiga yang berfungsi membantu aktivitas pekerjaan kantor sehari-hari.
Tujuan	:	Mencukupi kebutuhan administratif perkantoran.
Rumus Pengukuran	:	$(\text{Jumlah jasa penunjang OPD yang dilaksanakan} / \text{Jumlah jasa penunjang ideal OPD}) \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	-
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	-
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	SPJ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 5 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- * Pernyataan Outcome : Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator Kinerja	:	Persentase Peralatan dan Mesin Barang Milik Daerah yang Dipelihara
Definisi Indikator Kinerja	:	Kondisi sarana prasarana pendukung kantor dalam kondisi Baik merupakan perwujudan pertama OPD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari, sekaligus untuk mendukung aktivitas lapangan dan perkantoran.
Tujuan	:	Meningkatkan semangat dalam bekerja dan beraktivitas baik pekerjaan lapangan maupun administratif.
Rumus Pengukuran	:	$(\text{Jumlah peralatan dan mesin, barang milik OPD yang dipelihara} / \text{Jumlah peralatan dan mesin, barang milik OPD yang dikelola}) \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	-
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	-
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	SPJ laporan pemeliharaan barang milik daerah

B. Program : Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya cakupan pelayanan informasi publik**

Indikator Kinerja	:	Persentase cakupan pelayanan informasi publik
Definisi Indikator Kinerja	:	Persentase yang menunjukkan proporsi pelayanan informasi publik yang telah menjangkau masyarakat dari total populasi atau target penerima manfaat.
Tujuan	:	Untuk mengetahui tingkat cakupan pelayanan informasi publik sebagai upaya meningkatkan keterbukaan informasi dan akses masyarakat terhadap informasi yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga terkait
Rumus Pengukuran	:	$(\text{Jumlah informasi yang dipublikasikan di website perangkat daerah} / \text{Total jumlah Informasi publik OPD}) \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang 9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Sistem Layanan Terpadu untuk Keterbukaan Informasi Publik
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelatihan 2. Kurangnya Pemahaman dan Budaya Keterbukaan Informasi 3. Keterbatasan dalam Pengelolaan dan Penyediaan Data 4. Peraturan dan Kebijakan Lokal yang Kurang Mendukung 5. Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Hak Akses Informasi Publik 6. Pengelolaan dan Penyebaran Informasi yang Kurang Terkoordinasi 7. Anggaran yang Terbatas
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi

- 1 Kegiatan : Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**
- * Pernyataan Outcome : Meningkatnya Persentase informasi publik yang disajikan badan publik kabupaten dan OPD**

Indikator Kinerja	:	Persentase informasi publik yang disajikan badan publik kabupaten dan OPD
Definisi Indikator Kinerja	:	Persentase informasi publik yang disajikan oleh badan publik kabupaten dan OPD yang memenuhi standar keterbukaan informasi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Tujuan	:	Meningkatkan transparansi, aksesibilitas, dan efisiensi pengelolaan informasi publik oleh pemerintah daerah, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi keterbukaan informasi dan mendukung partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan berbasis informasi yang akurat dan tepat waktu.
Rumus Pengukuran	:	(Jumlah informasi publik yang disajikan oleh badan publik dan OPD / Total jumlah keseluruhan informasi badan publik dan OPD) x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelatihan 2. Kurangnya Pemahaman dan Budaya Keterbukaan Informasi 3. Keterbatasan dalam Pengelolaan dan Penyediaan Data 4. Peraturan dan Kebijakan Lokal yang Kurang Mendukung 5. Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Hak Akses Informasi Publik 6. Pengelolaan dan Penyebaran Informasi yang Kurang Terkoordinasi 7. Anggaran yang Terbatas
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Laporan Tahunan Media Sosial

C. Program : Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya OPD yang terkoneksi jaringan**

Indikator Kinerja	:	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan
Definisi Indikator Kinerja	:	Presentase yang menggambarkan kualitas ketersediaan koneksi jaringan data antar OPD di Lingkungan Pemkab Rembang
Tujuan	:	untuk menilai sejauh mana kualitas koneksi jaringan data antar OPD
Rumus Pengukuran	:	$(\text{Jumlah Perangkat Daerah yang saling terkoneksi di Jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses Internet yang disediakan oleh dinas kominfo}) / (\text{Total jumlah Perangkat Daerah}) \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	permasalahan mengenai terbatasnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Tata Kelola dan Layanan Informatika
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Dinkominfo Kabupaten Rembang

1 Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya cakupan OPD dan desa yang menggunakan domain rembangkab. go.id**

Indikator Kinerja	:	Cakupan OPD dan desa yang menggunakan domain rembangkab. go.id
Definisi Indikator Kinerja	:	Presentase OPD dan desa yang website resminya menggunakan domain rembangkab. go.id
Tujuan	:	untuk menilai sejauh mana tingkat kepatuhan penggunaan nama domain OPD dan desa dalam pengelolaan website resmi
Rumus Pengukuran	:	(Jumlah Perangkat Daerah dan Desa yang menggunakan domain dan sub domain rembangkab. go.id) / (Total Jumlah Perangkat Daerah) x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	kurangnya koordinasi atau sosialisasi terkait Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Tata Kelola dan Layanan Informatika
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Dinkominfo Kabupaten Rembang

2 Kegiatan : Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya kualitas layanan SPBE**

Indikator Kinerja	:	Jumlah layanan tata kelola SPBE
Definisi Indikator Kinerja	:	Nilai yang mempresentasikan tingkat kematangan layanan SPBE di Lingkungan Pemkab Rembang berdasarkan hasil penilaian KEMENPAN RB
Tujuan	:	untuk menilai sejauh mana kualitas layanan/aplikasi SPBE, baik layanan administrasi maupun layanan publik berbasis elektronik
Rumus Pengukuran	:	Jumlah layanan tata kelola SPBE yang diampu pemerintah daerah
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 3. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	a. kurangnya ketersediaan infrastruktur TIK b. permasalahan mengenai pengembangan aplikasi berbagi pakai kewenangannya ada pada instansi vertikal c. permasalahan mengenai terbatasnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Tata Kelola dan Layanan Informatika
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil penilaian mandiri SPBE oleh KEMENPAN RB pada Domain Layanan

D. Program : Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya publikasi data statistik sektoral di lingkungan daerah kabupaten / kota**

Indikator Kinerja	:	Persentase publikasi data statistik sektoral di lingkungan daerah kabupaten / kota
Definisi Indikator Kinerja	:	Persentase atau bagian dari seluruh data pembangunan yang bersifat numerik yang dipublikasikan untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana data statistik yang berkaitan dengan sektor-sektor tertentu (misalnya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dll.) dipublikasikan oleh pemerintah daerah, baik secara periodik maupun berbasis kebijakan tertentu.
Tujuan	:	1. Sebagai bahan untuk menilai tingkat keterbukaan dan efektivitas kebijakan pengelolaan data statistik di tingkat kabupaten/kota; 2. Sebagai Wujud Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sebagai Dasar dalam Pengambilan Keputusan/Kebijakan Pemerintah yang Lebih Baik; 4. Sebagai Bahan Penelitian Bagi Mahasiswa; 5. Sebagai Wujud Keterbukaan Informasi Pemerintah kepada Masyarakat.
Rumus Pengukuran	:	$(\text{Jumlah data statistik sektoral yang dipublikasikan} / \text{Total jumlah data statistik sektoral yang tersedia}) \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia; 2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang. 3. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Rembang.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	a. Belum semua OPD melakukan pengelola data secara baik/sistematis ; b. Keterbatasan SDM di masing-masing OPD dalam Pengelolaa Data;
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Statistik dan Persandian
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif sesuai yang tertuang dalam Renstra
Sumber data	:	OPD se- Kabupaten Rembang

1 Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya OPD yang menyusun data statistik yang berkontribusi dalam sistem satu data**

Indikator Kinerja	:	Jumlah OPD yang menyusun data statistik yang berkontribusi dalam sistem satu data
Definisi Indikator Kinerja	:	Jumlah instansi atau organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan dan pengelolaan data statistik yang akan digabungkan ke dalam suatu sistem data terintegrasi (Satu Data Indonesia)
Tujuan	:	1. Mengukur Keterlibatan OPD dalam Pengelolaan Data; 2. Mendukung Sistem Satu Data Indonesia; 3. Mendorong Transparansi dan Aksesibilitas Data; 4. Meningkatkan Koordinasi Antar OPD dalam pengumpulan dan pemanfaatan data
Rumus Pengukuran	:	Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Rembang
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia; 2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang. 3. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Rembang.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	a. Belum semua OPD melakukan pengelolaan data secara baik/sistematis ; b. Keterbatasan SDM di masing-masing OPD dalam Pengelolaan Data;
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Statistik dan Persandian
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif sesuai yang tertuang dalam Renstra
Sumber data	:	OPD se- Kabupaten Rembang

E. Program : Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya cakupan pengamanan informasi**

Indikator Kinerja	:	Persentase cakupan pengamanan informasi
Definisi Indikator Kinerja	:	Metrik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sistem dan data suatu organisasi atau instansi telah dilindungi dari risiko atau ancaman terhadap keamanan informasi. Persentase ini memberikan gambaran tentang tingkat implementasi kontrol atau langkah-langkah pengamanan dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.
Tujuan	:	1. Menjamin Integritas Informasi 2. Menjaga Ketersediaan Informasi 3. Mencegah Kebocoran Informasi 4. Mendukung Operasional yang Aman 5. Memenuhi Kepatuhan Hukum dan Standar Keamanan
Rumus Pengukuran	:	$(\text{Jumlah aplikasi/website milik pemda yang diamankan} / \text{Total jumlah aplikasi /website milik pemda yang dikelola}) \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 3. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengamanan Informasi .
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	1. Keterbatasan Anggaran 2. Kurangnya Sumber Daya Manusia Terampil 3. Kurangnya Kesadaran Keamanan Informasi di OPD 4. Infrastruktur Teknologi yang Terbatas 5. Ancaman Siber yang Terus Berkembang 6. Ketidakpatuhan terhadap Regulasi dan Standar Keamanan
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Statistik dan Persandian
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif sesuai yang tertuang dalam Renstra
Sumber data	:	Website yang Diamankan

1 Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya**

Indikator Kinerja	:	Persentase berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya
Definisi Indikator Kinerja	:	Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana informasi mengenai suatu daerah dapat disampaikan kepada masyarakat secara tepat waktu, akurat, dan tanpa gangguan, serta tetap menjaga aspek keamanan data dan sumber informasi.
Tujuan	:	1.Menyediakan Informasi yang Cepat dan Akurat 2.Menjamin Keamanan Data dan Informasi
Rumus Pengukuran	:	(Jumlah berita daerah yang terjaga keamanannya / Total jumlah berita daerah yang dikelola) x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 3. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengamanan Informasi .
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	1.Penyalahgunaan atau Manipulasi Sumber Berita 2.Kesulitan dalam Menjaga Kerahasiaan Sumber Berita 3.Kesulitan dalam Mengelola Volume Berita
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Statistik dan Persandian
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif sesuai yang tertuang dalam Renstra
Sumber data	:	Jumlah berita yang dikelola



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Gatot Subroto No. 8 Rembang Telp. (0295) 6980754
Fax (0295) 6980754 Email : dinkominfo@rembangkab.go.id
web : <http://dinkominfo.rembangkab.go.id>
REMBANG – KODE POS 59212

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. EC. GANTIARTO St

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd. I

Jabatan : BUPATI REMBANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, Januari 2024

Pihak Kedua

H. ABDUL HAFIDZ, S. Pd. I

Pihak Pertama

Drs. EC. GANTIARTO, St
Pembina Utama Muda
NIP. 19651226 199401 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tujuan :		
I	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,30
	Sasaran :		
I.1	Terwujudnya Manajemen dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien	Indeks Kebijakan	3,06
		Indeks Tatakelola	2,66
		Indeks Penerapan Manajemen	2,24
		Indeks Layanan	3,69
I.2	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	90
I.3	Terwujudnya Perlindungan Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	310
I.4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	65

No	Nama Program	Jumlah Anggaran (Rp.)	Sumber Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	300.000.000	APBD
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	725.000.000	APBD
3	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	25.000.000	APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	125.000.000	APBD
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	5.232.546.000	APBD
JUMLAH		6.407.546.000	

Rembang, Januari 2024



Pihak Kedua

H. ABDUL HAFIDZ, S. Pd.I

Pihak Pertama

Drs. EC. GANTIARTO, St
Pembina Utama Muda
NIP. 19651226 199401 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Gatot Subroto No. 8 Rembang Telp. (0295) 6980754
Fax (0295) 6980754 Email : dinkominfo@rembangkab.go.id
web : <http://dinkominfo.rembangkab.go.id>
REMBANG – KODE POS 59212

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. EC. GANTIARTO St
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd. I
Jabatan : BUPATI REMBANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 13 November 2024

PIHAK KEDUA



H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.

PIHAK PERTAMA



Drs. EC. GANTIARTO, St

Pembina Utama Muda

NIP. 19651226 199401 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG**

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tujuan :		
I	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,30
	Sasaran :		
I.1	Terwujudnya Manajemen dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien	Indeks Kebijakan	3,06
		Indeks Tatakelola	2,66
		Indeks Penerapan Manajemen	2,24
		Indeks Layanan	3,69
I.2	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	90
I.3	Terwujudnya Perlindungan Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	310
I.4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	65

No	Nama Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	370.000.000	APBD
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	754.000.000	APBD
3	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	33.500.000	APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	130.000.000	APBD
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	5.238.561.980	APBD
	Jumlah	6.526.061.980	

Rembang, 13 November 2024

BUPATI REMBANG



H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG



Drs. EG. SANTIARTO, St
Pembina Utama Muda
NIP. 19651226 199401 1 001



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 663 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah, telah dilakukan kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Tahun 2024, perlu menetapkan hasil kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 706); dan
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 299 Tahun 2024 tentang Lokus Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS

ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 615 (*enam ratus lima belas*) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Instansi Pusat yang mengalami perubahan nomenklatur atau pemisahan, dapat menggunakan hasil evaluasi mengikuti nomenklatur instansi sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Instansi Pusat yang mengalami perubahan nomenklatur atau pemisahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat menggunakan hasil evaluasi sebagai capaian kinerja tahun 2024 dan acuan untuk perencanaan kinerja tahun 2025.
- KEEMPAT : Setiap Pimpinan Instansi Pemerintah dihimbau untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

RINI WIDYANTINI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum



Rejeki Nawangsasih

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
6	Pemerintah Kota Yogyakarta	3,50	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	4,42	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Semarang	3,31	Baik
3	Pemerintah Kab. Kendal	3,66	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Demak	3,93	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Grobogan	3,57	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Pekalongan	3,05	Baik
7	Pemerintah Kab. Batang	3,55	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Tegal	3,16	Baik
9	Pemerintah Kab. Brebes	2,84	Baik
10	Pemerintah Kab. Pati	3,75	Sangat Baik
11	Pemerintah Kab. Kudus	4,23	Memuaskan
12	Pemerintah Kab. Pemasang	3,04	Baik
13	Pemerintah Kab. Jepara	3,51	Sangat Baik
14	Pemerintah Kab. Rembang	3,99	Sangat Baik
15	Pemerintah Kab. Blora	3,28	Baik
16	Pemerintah Kab. Banyumas	4,09	Sangat Baik
17	Pemerintah Kab. Cilacap	3,27	Baik
18	Pemerintah Kab. Purbalingga	3,93	Sangat Baik
19	Pemerintah Kab. Banjarnegara	3,72	Sangat Baik
20	Pemerintah Kab. Magelang	3,92	Sangat Baik
21	Pemerintah Kab. Temanggung	3,64	Sangat Baik
22	Pemerintah Kab. Wonosobo	3,79	Sangat Baik
23	Pemerintah Kab. Purworejo	3,49	Baik
24	Pemerintah Kab. Kebumen	4,07	Sangat Baik
25	Pemerintah Kab. Klaten	4,07	Sangat Baik
26	Pemerintah Kab. Boyolali	3,89	Sngat Baik
27	Pemerintah Kab. Sragen	4,34	Memuaskan
28	Pemerintah Kab. Sukoharjo	4,45	Memuaskan
29	Pemerintah Kab. Karanganyar	3,90	Sangat Baik



K E P U T U S A N
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 01/KPTS/KI-JTG/XII/2024

T E N T A N G
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA BADAN PUBLIK DI LINGKUP
PROVINSI JAWA TENGAH DALAM RANGKA MONITORING DAN
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. Monitoring dan evaluasi Badan Publik yang meliputi konten informasi publik wajib berkala, penilaian website dan media sosial, penilaian Self Assesment Quisioner (SAQ) melalui aplikasi E-monev, hasil visitasi dan verifikasi serta hasil uji publik, maka perlu ditetapkan kategori keterbukaan informasi publik Badan Publik berdasarkan kategori Informatif dan kategori Menuju Informatif untuk Badan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Pemerintah Prov. Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota, Badan Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/ Kota dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/ Kota yang ada di lingkup Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bahwa guna penetapan kategori Informatif dan Menuju Informatif sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
- Memperhatikan : Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada

tanggal 26 November 2024, yang dihadiri Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Asisten Komisioner dan staff Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dengan memperhatikan seluruh tahapan nilai menetapkan kategori monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Badan Publik berdasarkan kategori Informatif dan kategori Menuju Informatif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Pemerintah Prov. Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota, Badan Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/ Kota dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/ Kota yang ada di lingkup Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No.58);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan kategori hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Jawa Tengah dengan kategori Informatif dan Menuju Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan kategori hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Badan Publik SKPD Provinsi Jawa Tengah dengan kategori Informatif dan Menuju Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KETIGA** : Menetapkan kategori hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan kategori Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

- KEEMPAT** : Menetapkan kategori hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dengan kategori Informatif dan Menuju Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KELIMA** : Menetapkan kategori hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Badan Vertikal di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan kategori kategori Informatif dan Menuju Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEENAM** Menetapkan kategori hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan kategori Menuju Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KETUJUH** Menetapkan kategori hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan kategori kategori Informatif dan Menuju Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDELAPAN** Menetapkan kategori hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan kategori Informatif dan Menuju Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 6 Desember 2024

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

INDRA ASHOKA MAHENDRAYANA, SE, MH

LAMPIRAN I:

SURAT KEPUTUSAN KETUA
KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 01/KPTS/KI-JTG/XII/
2024

DAFTAR SUSUNAN BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TENGAH KATEGORI INFORMATIF DAN MENUJU INFORMATIF

TAHUN 2024

BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
KABUPATEN SUKOHARJO	99,38	INFORMATIF
KOTA SEMARANG	99,34	INFORMATIF
KABUPATEN WONOSOBO	97,61	INFORMATIF
KOTA SALATIGA	96,83	INFORMATIF
KOTA MAGELANG	96,73	INFORMATIF
KABUPATEN BANYUMAS	96,66	INFORMATIF
KABUPATEN KENDAL	96,32	INFORMATIF
KABUPATEN PURBALINGGA	96,19	INFORMATIF
KOTA PEKALONGAN	96,03	INFORMATIF
KABUPATEN TEMANGGUNG	95,86	INFORMATIF
KOTA SURAKARTA	95,59	INFORMATIF
KABUPATEN PATI	95,35	INFORMATIF
KABUPATEN DEMAK	95,20	INFORMATIF
KABUPATEN KARANGANYAR	94,88	INFORMATIF
KABUPATEN KLATEN	94,84	INFORMATIF
KOTA TEGAL	94,73	INFORMATIF
KABUPATEN BREBES	93,33	INFORMATIF
KABUPATEN BLORA	92,76	INFORMATIF

KABUPATEN CILACAP	92,32	INFORMATIF
KABUPATEN REMBANG	92,05	INFORMATIF
KABUPATEN BATANG	92,04	INFORMATIF
KABUPATEN WONOGIRI	90,93	INFORMATIF
KABUPATEN MAGELANG	90,78	INFORMATIF
KABUPATEN BANJARNEGARA	89,56	MENUJU INFORMATIF
KABUPATEN BOYOLALI	89,53	MENUJU INFORMATIF
KABUPATEN TEGAL	88,75	MENUJU INFORMATIF
KABUPATEN KUDUS	88,18	MENUJU INFORMATIF
KABUPATEN PEMALANG	85,17	MENUJU INFORMATIF
KABUPATEN PURWOREJO	84,66	MENUJU INFORMATIF
KABUPATEN JEPARA	84,18	MENUJU INFORMATIF
KABUPATEN KEBUMEN	84,13	MENUJU INFORMATIF

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

INDRA ASHOKA MAHENDRAYANA, SE, MH